



RENCANA STRATEGIS

Pelabuhan Perikanan Nusantara Tanjungpandan
Tahun 2020-2024
REVISI-4



DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP
PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA TANJUNGPANDAN
TAHUN 2023

KATA PENGANTAR

Dengan mengucap puji syukur kehadiran Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Revisi 4 Pelabuhan Perikanan Nusantara Tanjungpandan Tahun 2020-2024 dapat terselesaikan dengan baik.

Mengacu pada amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, maka Pelabuhan Perikanan Nusantara Tanjungpandan telah menyusun Rencana Strategis (Renstra) untuk tahun 2020-2024. Renstra Pelabuhan Nusantara Tanjungpandan merupakan dokumen perencanaan yang bersifat indikatif yang memuat program dan kegiatan pengelolaan perikanan tangkap di Pelabuhan Perikanan Nusantara Tanjungpandan yang akan dilaksanakan langsung oleh pelabuhan perikanan dengan mendorong peran aktif masyarakat perikanan di kawasan pelabuhan perikanan selama kurun waktu tahun 2020-2024.

Rencana Strategis (Renstra) Revisi 4 Pelabuhan Perikanan Nusantara Tanjungpandan tahun 2020-2024 merupakan pedoman perencanaan dalam menyusun rencana kerja program dan kegiatan tahunan khususnya dalam pembangunan perikanan tangkap selama 5 (lima) tahun ke depan yang berisi strategi, kebijakan, program, dan kegiatan beserta dukungan penganggaran untuk mencapai visi, misi, tujuan, dan sasaran yang telah ditetapkan. Dokumen rencana strategis ini diharapkan dapat dijadikan acuan untuk pelaksanaan pembangunan perikanan tangkap di Pelabuhan Perikanan Nusantara Tanjungpandan dengan melibatkan *stakeholder* terkait.

Akhir kata, semoga Rencana Strategis (Renstra) ini dapat memberikan manfaat terutama dalam pengembangan perikanan tangkap yang maju, mandiri, dan berkelanjutan untuk mewujudkan masyarakat nelayan yang sejahtera.

Tanjungpandan, 23 November 2023

Kepala Pelabuhan Perikanan

Nusantara Tanjungpandan



Arif Usman, S.Pi, M.Si

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	2
DAFTAR ISI	3
BAB. I PENDAHULUAN	4
A. Kondisi Umum	4
B. Tugas dan Fungsi	5
C. Maksud dan Tujuan	7
D. Alur Pikir	8
BAB II. VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN STRATEGIS	9
A. Pembangunan Kelautan dan Perikanan	9
B. Pembangunan Perikanan Tangkap	11
C. Pembangunan Pelabuhan Perikanan Nusantara Tanjungpandan	14
BAB. III ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN	18
A. Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan Kelautan dan Perikanan	18
B. Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan Perikanan Tangkap	24
C. Arah Kebijakan dan Strategi	27
BAB. IV INDIKATOR KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN	38
A. Indikator Kinerja	38
B. Kerangka Pendanaan	49
BAB V. PENUTUP	51

BAB. I PENDAHULUAN

A. Kondisi Umum

Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Tanjungpandan adalah salah satu dari 22 buah pelabuhan perikanan yang merupakan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Perikanan Tangkap. PPN Tanjungpandan terletak di Jalan Laksamana RE. Martadinata Kecamatan Tanjungpandan, Kabupaten Belitung, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan letak geografis 2°44'39.5"S 107°38'00.1"E.

Awal pembangunan Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Tanjungpandan yang mulai dibangun sejak tahun 1975/1976, di atas tanah seluas 5 Ha semula adalah Pelabuhan Perikanan Pantai dan sejak tahun 2011 pelabuhan ini ditingkatkan statusnya menjadi Pelabuhan Perikanan Nusantara berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor: 26.I/MEN/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelabuhan Perikanan.

PPN Tanjungpandan mempunyai visi yaitu “Terwujudnya Pelabuhan Perikanan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi perikanan di Kabupaten Belitung untuk mensejahterakan masyarakat dan nelayan.” Sedangkan misinya adalah 1). Mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya ikan secara berkelanjutan dan meningkatkan efisiensi usaha perikanan tangkap, 2). Meningkatkan fasilitas dan jasa untuk menyokong pertumbuhan usaha perikanan, 3). Meningkatkan pengendalian dan pengawasan penangkapan sumberdaya kelautan dan perikanan, dan 4). Meningkatkan koordinasi pelayanan dan pelaksanaan tugas operasional.

Adapun dasar hukum pengelolaan pelabuhan perikanan antara lain:

1. Undang-undang RI No.31 Tahun 2004 tentang Perikanan.
2. Undang-undang RI No.45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-undang RI No.31Tahun 2004 tentang Perikanan.
3. Peraturan Pemerintah No.11 tahun 1985 tentang Pembinaan Kepelabuhan.
4. Peraturan Pemerintah No.62 tahun 2002 tentang tarif atas PNBP pada DKP.
5. Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 2006 tentang perubahan tarif atas jenis PNBP padaDKP.
6. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor: PER.16/MEN/2006 tentang Pelabuhan Perikanan.
7. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor: PER.06/MEN/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelabuhan Perikanan.
8. Surat Keputusan Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Nomor 432/DPT.3/OT.220/D.3/I/2008 tentang Pedoman Evaluasi Kinerja Unit Pelaksana Teknis Pelabuhan Perikanan.

B. Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.20/MEN/2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pelabuhan Perikanan, bahwa Pelabuhan Perikanan mempunyai tugas Pelabuhan Perikanan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan dan pelayanan pemanfaatan sumberdaya ikan, serta keselamatan operasional kapal perikanan. Sedangkan dalam rangka melaksanakan fungsinya berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.08/MEN/2012 tentang Kepelabuhanan Perikanan, Pelabuhan Perikanan menyelenggarakan fungsi pemerintahan dan perusahaan sebagai berikut:

a. Fungsi Pemerintahan:

- 1) Pelayanan pembinaan mutu dan pengolahan hasil perikanan;
- 2) Pengumpulan data tangkapan dan hasil perikanan;
- 3) Tempat pelaksanaan penyuluhan dan pengembangan masyarakat nelayan;
- 4) Pelaksanaan kegiatan operasional kapal perikanan;
- 5) Tempat pelaksanaan pengawasan dan pengendalian sumberdaya ikan;
- 6) Pelaksanaan kesyahbandaran;
- 7) Tempat pelaksanaan fungsi karantina ikan;
- 8) Publikasi hasil pelayanan sandar dan labuh kapal perikanan dan kapal pengawas kapal perikanan;
- 9) Tempat publikasi hasil penelitian kelautan dan perikanan;
- 10) Pemantauan wilayah pesisir;
- 11) Pengendalian lingkungan;
- 12) Kepabeanan; dan/atau
- 13) Keimigrasian.

b. Fungsi Perusahaan:

- 1) Pelayanan tambat dan labuh kapal perikanan;
- 2) Pelayanan bongkar muat ikan;
- 3) Pelayanan pengolahan hasil perikanan;
- 4) Pemasaran dan distribusi ikan;
- 5) Pemanfaatan fasilitas dan lahan di pelabuhan perikanan;
- 6) Pelayanan perbaikan dan pemeliharaan kapal perikanan;

- 7) Pelayanan logistik dan perbekalan kapal perikanan;
- 8) Wisata bahari; dan/atau
- 9) Penyediaan dan/atau pelayanan jasa lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi pelabuhan perikanan tersebut, maka disusun struktur organisasi Pelabuhan Perikanan Nusantara berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 66/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Perikanan Tangkap, sebagai berikut :

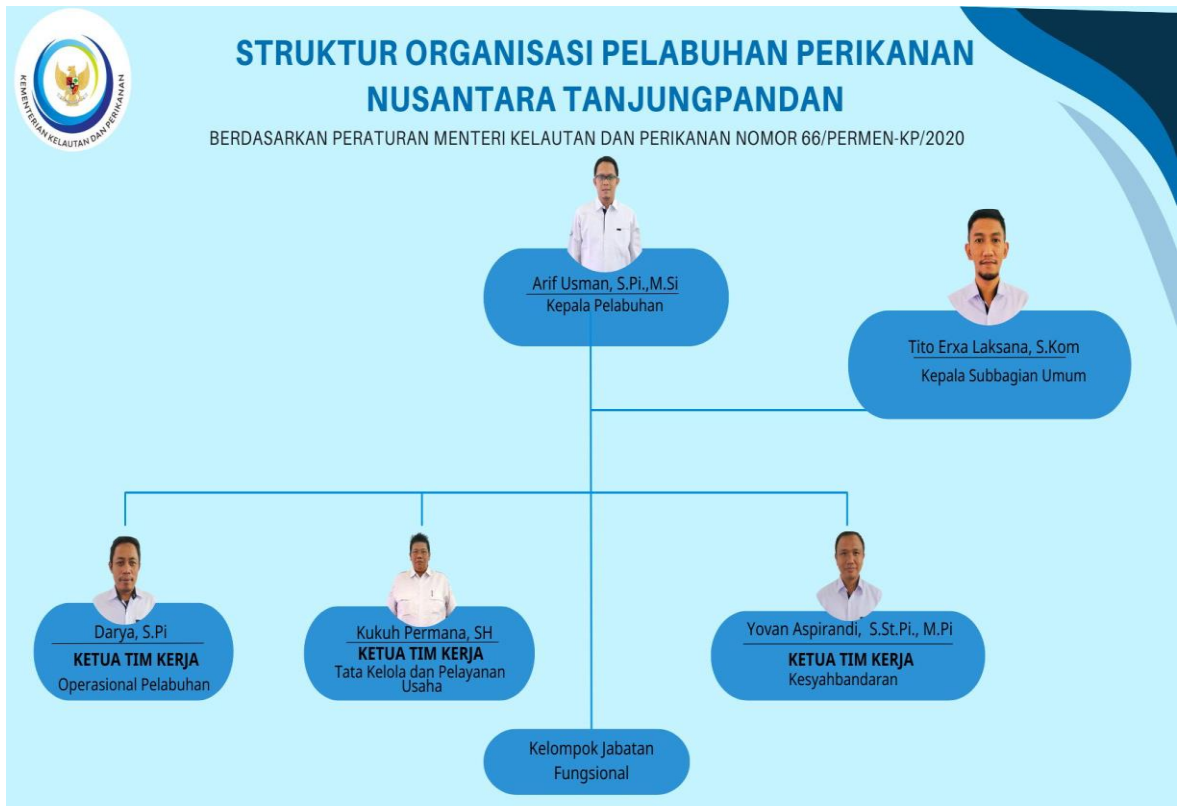
1. **Sub Bagian Umum**, yang dipimpin oleh Kepala Sub Bagian Umum yang mempunyai tugas mempunyai tugas:
 - a. Melakukan urusan hubungan masyarakat, organisasi dan tata laksana, kepegawaian, persuratan, kearsipan, dokumentasi, dan rumah tangga, serta pengelolaan barang milik negara dan perlengkapan.
 - b. Melakukan penyusunan, pemantauan, dan evaluasi rencana, program, dan anggaran, pelaporan, urusan keuangan, hubungan masyarakat, organisasi dan tata laksana, kepegawaian, persuratan, kearsipan, dokumentasi, dan rumah tangga, serta pengelolaan barang milik negara dan perlengkapan.
2. **Kelompok jabatan fungsional** mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Unit Pelaksana Teknis Perikanan Tangkap sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.

Adapun fungsi pelaksana teknis terdiri dari:

- a. Penyusunan, pemantauan, dan evaluasi rencana, program, dan anggaran, serta pelaporan dibidang pelabuhan perikanan;
- b. Pelaksanaan pengaturan keberangkatan, kedatangan, dan keberadaan kapal perikanan di pelabuhan perikanan;
- c. Pelaksanaan pelayanan penerbitan surat tanda bukti lapor kedatangan dan keberangkatan kapal perikanan;
- d. Pelaksanaan pemeriksaan logbook penangkapan ikan;
- e. Pelaksanaan pelayanan penerbitan persetujuan berlayar;
- f. Pelaksanaan penerbitan sertifikat hasil tangkapan ikan;
- g. Pelaksanaan pengawasan pengisian bahan bakar;
- h. Pelaksanaan pembangunan, pengembangan, pemeliharaan, pendayagunaan, dan pengawasan, serta pengendalian sarana dan prasarana;
- i. Pelaksanaan fasilitasi penyuluhan, pengawasan dan pengendalian sumber daya ikan, perkarantinaan ikan, publikasi hasil penelitian, pemantauan wilayah pesisir, wisata bahari, pembinaan mutu, serta pengolahan, pemasaran, dan distribusi hasil perikanan;
- j. Pelayanan jasa, pemanfaatan lahan, dan fasilitas usaha;
- k. Pelaksanaan pengumpulan data, informasi, dan publikasi;

- l. Pelaksanaan bimbingan teknis dan penerbitan sertifikat cara penanganan ikan yang baik;
- m. Pelaksanaan inspeksi pengendalian mutu hasil perikanan pada kegiatan penangkapan ikan;
- n. Pelaksanaan pengendalian lingkungan di pelabuhan perikanan; dan
- o. Pelaksanaan urusan ketatausahaan.

Adapun struktur organisasi di Pelabuhan Perikanan Nusantara Tanjungpandan adalah sebagai berikut:



Gambar 1. Struktur Organisasi Pelabuhan Perikanan Nusantara Tanjungpandan

C. Maksud dan Tujuan

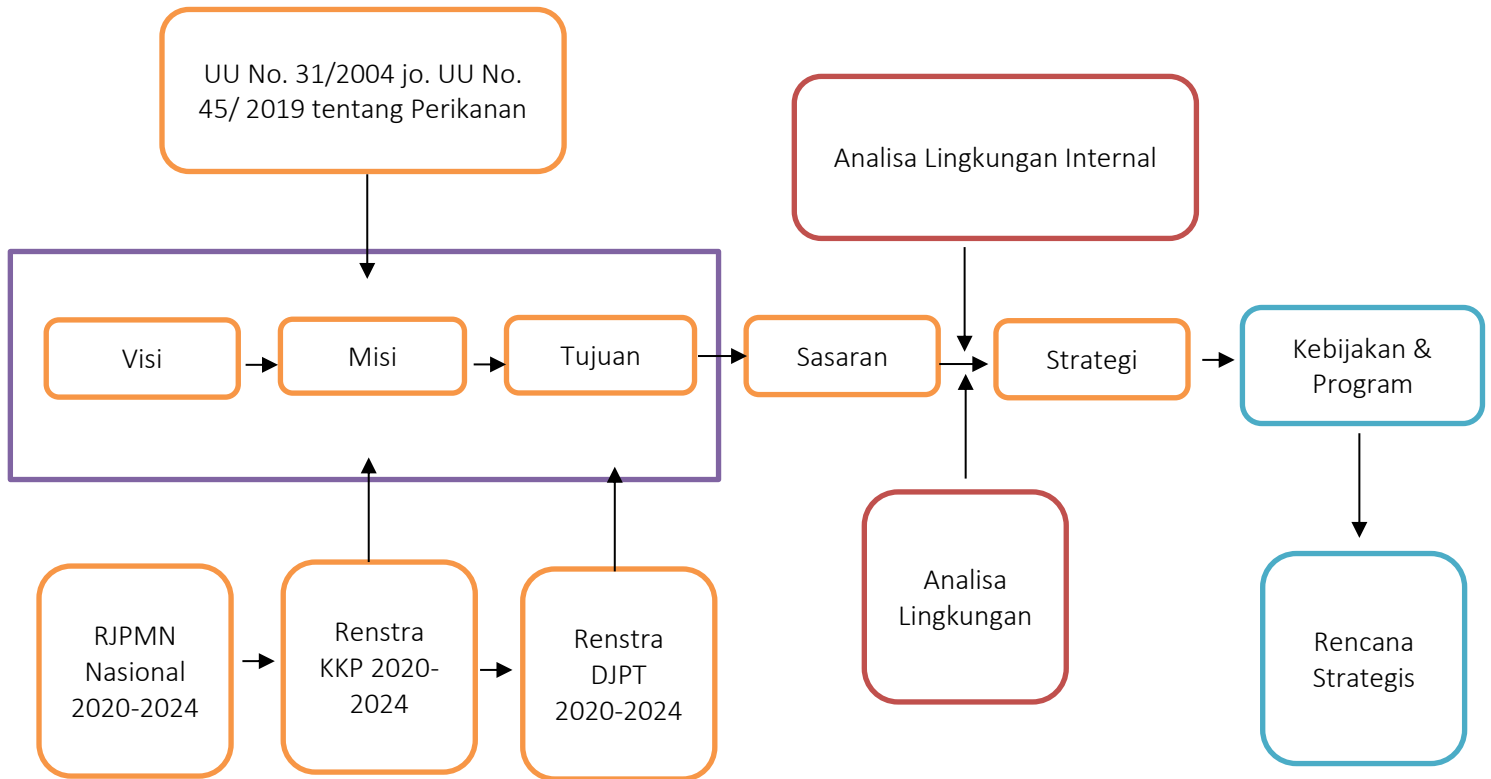
Maksud dan tujuan penyusunan Rencana Strategi Pelabuhan Perikanan Nusantara Tanjungpandan Tahun 2020-2024 adalah sebagai acuan dan pedoman pengembangan dan pembangunan PPN Tanjungpandan berdasarkan tugas, pokok, dan fungsinya untuk mewujudkan visi perikanan tangkap periode kurun waktu 5 tahun ke depan yaitu 2020-2024.

Dalam pelaksanaannya Rencana Strategis dijabarkan ke dalam Rencana Kerja Tahunan (RKT) yang disusun secara sistematis dan berkesinambungan. Rencana Strategis dimaksud diuraikan ke dalam program dan kegiatan dengan memperhitungkan peluang, tantangan, ancaman, dan hambatan yang mungkin timbul. Rencana strategis tersebut juga merupakan komitmen organisasi dan sekaligus diharapkan mampu memberikan

motivasi dan petunjuk kepada *stakeholder* yang terlibat dalam aktivitas operasional Pelabuhan.

D. Alur Pikir

Alur pikir penyusunan Renstra Pelabuhan Perikanan Nusantara Tanjungpandan tersaji pada gambar berikut:



BAB II. VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN STRATEGIS

A. Pembangunan Kelautan dan Perikanan

Visi Kementerian Kelautan dan Perikanan

Visi KKP 2020-2024 adalah “Terwujudnya Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang Sejahtera dan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan” untuk mewujudkan “Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian, berlandaskan Gotong Royong”.

Misi Kementerian Kelautan dan Perikanan

Mengacu pada tugas, fungsi dan wewenang yang telah dimandatkan dalam peraturan perundang-undangan kepada KKP dan untuk melaksanakan Misi Presiden dalam RPJMN 2020-2024, KKP menjalankan 4 (empat) dari 9 (sembilan) Misi Presiden yaitu:

Misi 1. Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia, melalui:

- Peningkatan Daya Saing SDM KP
- Pengembangan Inovasi dan Riset Kelautan dan Perikanan

Misi 2. Struktur Ekonomi Yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing, melalui:

- Peningkatan Kontribusi Ekonomi Sektor Kelautan dan Perikanan terhadap Perekonomian Nasional

Misi 3. Mencapai Lingkungan Hidup Yang Berkelanjutan

- Peningkatan Kelestarian Sumber Daya Kelautan dan Perikanan.

Misi 4. Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya

- Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan di KKP.

Tujuan Pembangunan Kelautan dan Perikanan

Menjabarkan misi Kementerian Kelautan dan Perikanan, maka tujuan pembangunan kelautan dan perikanan adalah :

1. Peningkatan Daya Saing SDM KP dan Pengembangan Inovasi dan Riset Kelautan dan Perikanan, yakni:
 - a. Meningkatkan kapasitas dan kompetensi SDM Kelautan dan Perikanan;
2. Peningkatan Kontribusi Ekonomi Sektor Kelautan dan Perikanan terhadap Perekonomian Nasional, yakni:
 - a. Mengoptimalkan pengelolaan sumberdaya perikanan budidaya dan perikanan tangkap
 - b. Meningkatkan mutu, daya saing dan sistem logistik hasil kelautan dan perikanan
3. Peningkatan Kelestarian Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, yakni:
 - a. Mengoptimalkan pengelolaan ruang laut, konservasi dan keanekaragaman hayati,serta

- b. Meningkatkan pengawasan pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan
 - c. Mengembangkan sistem perkarantinaan ikan, pengendalian mutu, keamanan hasilperikanan, dan keamanan hayati ikan.
4. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan di KKP,yakni:
- a. Meningkatkan kinerja Reformasi Birokrasi KKP

Sasaran Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan

Adapun sasaran strategis pembangunan Kementerian Kelautan dan Perikanan 2020-2024 adalah sebagai berikut:

1. SS-1 yaitu Kesejahteraan masyarakat kelautan dan perikanan meningkat, dengan indikator kinerja Indeks Kesejahteraan Masyarakat Kelautan dan Perikanan (IKMKP), dari 59,16 pada tahun 2020 menjadi 63,87 pada tahun 2024.
2. SS-2 yaitu Ekonomi sektor kelautan dan perikanan meningkat, dengan indikator kinerja:
 - a. Pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) perikanan, dari 7,9% pada tahun 2020 menjadi 8,71% pada tahun 2024;
 - b. Nilai ekspor hasil perikanan, dari USD 6,17 miliar pada tahun 2020 menjadi USD 8,00 miliar pada tahun 2024; dan
 - c. Konsumsi ikan, dari 56,39 kg/kapita/tahun pada tahun 2020 menjadi 62,05 kg/kapita/tahun pada tahun 2024.
3. SS-3 yaitu Sumber daya kelautan dan perikanan berkelanjutan, dengan indikator kinerja:
 - a. Proporsi tangkapan jenis ikan yang berada dalam batasan biologis yang aman, dari $\leq 64\%$ pada tahun 2020 menjadi $\leq 80\%$ pada tahun 2024; dan
 - b. Luas kawasan konservasi perairan, dari 23,40 juta ha pada tahun 2020 menjadi 26,90 juta ha pada tahun 2024.
4. SS-4 yaitu Kapasitas dan kompetensi SDM kelautan dan perikanan meningkat, dengan indikator kinerja:
 - a. Persentase serapan lulusan pendidikan dan pelatihan pada Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI), dari 60% pada tahun 2020 menjadi 75% pada tahun 2024; dan
 - b. Kelompok pelaku utama/usaha yang ditingkatkan kelasnya, setiap tahun minimal sebanyak 1.500 kelompok per tahun selama 2020-2024.
5. SS-5 yaitu Hasil riset dan inovasi dimanfaatkan, dengan indikator kinerja yaitu hasil riset kelautan dan perikanan yang diadopsi/diterapkan, dari 5 (lima) hasil riset pada tahun 2020 menjadi 15 (lima belas) hasil riset pada tahun 2024.
6. SS-6 yaitu Tata kelola sumber daya kelautan dan perikanan bertanggung jawab, dengan indikator kinerja:
 - a. WPPNRI yang menjadi model percontohan penguatan tata kelola, dari 3 (tiga) WPPNRI pada tahun 2020 mejadi 11 (sebelas) WPPNRI, pada tahun 2024;
 - b. Penyelesaian penataan ruang laut dan zonasi pesisir, dari 24 (dua puluh empat) Rencana Zonasi pada tahun 2020 menjadi 12 (dua belas) Rencana Zonasi pada

- tahun 2024 (102 kumulatif Rencana Zonasi tahun 2020-2024); dan
- c. Persentase kepatuhan (Compliance) pelaku usaha kelautan dan perikanan, dari 94% pada tahun 2020 menjadi 98% pada tahun 2024.
7. SS-7 yaitu Industrialisasi kelautan dan perikanan berdaya saing, dengan indikator kinerja:
 - a. Produksi perikanan, dari 26,46 juta ton (produksi ikan 15,47 juta ton dan rumput laut 10,99 juta ton) pada tahun 2020 menjadi 32,75 juta ton (produksi ikan 20,42 juta ton dan rumput laut 12,33 juta ton) pada tahun 2024;
 - b. Produksi garam nasional, dari 3 juta ton pada tahun 2020 menjadi 3,4 juta ton pada tahun 2024;
 - c. Dana yang disalurkan untuk pelaku usaha kelautan dan perikanan skala kecil, dari Rp 2,8 triliun pada tahun 2020 menjadi Rp 4,2 triliun pada tahun 2024; dan
 - d. Kawasan kluster sentra produksi perikanan budidaya unggulan, dari 5 (lima) kawasan pada tahun 2020 menjadi 50 (lima puluh) kawasan pada tahun 2024.
 8. SS-8 yaitu Pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan integratif, dengan indikator kinerja:
 - a. Persentase cakupan WPPNRI yang dipantau dari kegiatan illegal fishing, dari 54% pada tahun 2020 menjadi 75% pada tahun 2024;
 - b. Persentase penanganan pelanggaran bidang Kelautan dan Perikanan, 93% dari tahun 2020 hingga tahun 2024; dan
 - c. Tingkat keberhasilan pengawasan di wilayah perbatasan, dari 77% pada tahun 2020 menjadi 82% pada tahun 2024.
 9. SS-9 yaitu Tata kelola pemerintahan yang baik, dengan indikator kinerja:
 - a. Nilai kinerja Reformasi Birokrasi (RB) KKP, dari 71 (tujuh Puluh Satu) pada tahun 2020 menjadi 75 (tujuh puluh lima) pada tahun 2024; dan
 - b. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA), dari 88 (delapan puluh delapan) pada tahun 2020 menjadi 90 (sembilan puluh) pada tahun 2024.

B. Pembangunan Perikanan Tangkap

Visi Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap

Visi Ditjen Perikanan Tangkap tahun 2020-2024 adalah “Terwujudnya Perikanan Tangkap yang Maju dan Berkelanjutan serta Masyarakat Perikanan Tangkap yang Mandiri dan Sejahtera” untuk mewujudkan “Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian berlandaskan Gotong-Royong”.

Misi Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap

Ditjen Perikanan Tangkap melaksanakan 4 (empat) Misi Presiden, dengan uraian sebagaiberikut :

1. Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia, melalui peningkatan kualitas SDM masyarakat perikanan tangkap;
2. Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing, melalui peningkatan

- kontribusi ekonomi subsektor perikanan tangkap;
3. Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan, melalui peningkatan keberlanjutan sumber daya perikanan tangkap; dan
 4. Pengeleloaan pemerintah yang bersif, efektif, dan terpercaya, melalui peningkatan tata Kelola pemerintahan di lingkup DJPT.

Tujuan Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap

Menjabarkan misi Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap, maka tujuan pembangunan pembangunan perikanan tangkap adalah :

1. Peningkatan kualitas SDM masyarakat perikanan tangkap, yaitu meningkatnya kapasitas dan kompetensi SDM perikanan tangkap, termasuk memberdayakan nelayan;
2. Peningkatan kontribusi ekonomi subsektor perikanan tangkap, yaitu:
 - a. Optimalnya integrasi pengembangan infrastruktur dan operasionalisasi Pelabuhan perikanan;
 - b. Mengembangkan armada perikanan tangkap nasional yang kompetitif dan produktif; dan
 - c. Mengakselerasi reformasi tata Kelola perizinan usaha perikanan tangkap;
3. Peningkatan keberlanjutan sumberdaya perikanan tangkap, yaitu optimalnya pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya ikan berbasis WPPNRI; dan
4. Peningkatan tata Kelola pemerintahan di lingkup DJPT, yaitu meningkatnya kinerja reformasi birokrasi DJPT secara berkualitas.

Sasaran Program Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap

Sasaran program perikanan tangkap merupakan kondisi yang ingin dicapai oleh DJPT sebagai suatu *outcome/impact* dari berbagai kegiatan yang dilaksanakan serta untuk mendukung pencapaian sasaran strategis pembangunan kelautan dan perikanan. Sasaran program DJPT 2020-2024 adalah sebagai berikut:

1. Kesejahteraan nelayan meningkat untuk mendukung SS-1 KKP : Kesejahteraan masyarakat kelautan dan perikanan meningkat. Indikator kinerja adalah Nilai Tukar Nelayan (NTN) (indeks), dengan target 102 (seratus dua) pada tahun 2020 menjadi 107 (seratus tujuh) pada tahun 2024.
2. Sumber daya perikanan tangkap berkelanjutan untuk mendukung SS-3 KKP : Sumber daya kelautan dan perikanan berkelanjutan. Indikator Kinerja adalah proporsi tangkapan jenis ikan yang berada dalam batasan biologis yang aman (persen), dengan target ≤ 64 pada tahun 2020 menjadi ≤ 80 pada tahun 2024.
3. Tata kelola sumber daya perikanan tangkap bertanggung jawab untuk mendukung SS-6 KKP: Tata kelola sumber daya kelautan dan perikanan bertanggung jawab. Indikator kinerja: WPPNRI yang menjadi model percontohan penguatan tata kelola (WPPNRI), dengan target 3 (tiga) pada tahun 2020 menjadi 11 (sebelas) pada tahun 2024.

4. Produktivitas perikanan tangkap meningkat untuk mendukung SS-7 KKP yaitu Industrialisasi kelautan dan perikanan berdaya saing). Indikator kinerja yaitu:
 - a. Jumlah produksi perikanan tangkap (juta ton), dengan target 8,020 pada tahun 2020 menjadi 10,105 pada tahun 2024.
 - b. Tingkat Kemandirian Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) dibawah tanggung jawab DJPT (skala kemandirian 1-5), dengan target 4 (empat) pada tahun 2020 menjadi 4 (empat) pada tahun 2024.
5. Tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan DJPT untuk mendukung SS- 9 KKP: Tata kelola pemerintahan yang baik. Indikator kinerja yaitu:
 - a. Nilai Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) DJPT (nilai), dengan target 30 (tiga puluh) pada tahun 2020 menjadi 34 (tiga puluh empat) pada tahun 2024;
 - b. Indeks Profesionalitas (IP) ASN DJPT (indeks), dengan target 72 (tujuh puluh dua) pada tahun 2020 menjadi 76 (tujuh puluh enam) pada tahun 2024;
 - c. Unit kerja yang Berpredikat Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) lingkup Ditjen Perikanan Tangkap (satker), dengan target 8 (delapan) pada tahun 2020 menjadi 12 (dua belas) pada tahun 2024;
 - d. Batas tertinggi nilai temuan LHP BPK atas LK DJPT dibandingkan realisasi anggaran Ditjen Perikanan Tangkap (persen), dengan target ≤ 1 pada tahun 2020 menjadi ≤ 1 pada tahun 2024;
 - e. Nilai PM SAKIP DJPT (nilai), dengan target 85 (delapan puluh lima) pada tahun 2020 menjadi 85,75 (delapan puluh lima koma tujuh puluh lima) pada tahun 2024;
 - f. Level maturitas SPIP DJPT (level), dengan target 3 (tiga) pada tahun 2020 menjadi 3 (tiga) pada tahun 2024;
 - g. Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar lingkup Ditjen Perikanan Tangkap (persen), dengan target 82 (delapan puluh dua) pada tahun 2020 menjadi 90 (sembilan puluh) pada tahun 2024;
 - h. Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup DJPT (persen), dengan target 60 (enam puluh) pada tahun 2020 menjadi 80 (delapan puluh) pada tahun 2024;
 - i. Unit yang menerapkan inovasi pelayanan publik lingkup Ditjen Perikanan Tangkap (unit kerja), dengan target 1 (satu) pada tahun 2020 menjadi 1 (satu) pada tahun 2024;
 - j. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) DJPT (nilai), dengan target 88 (delapan puluh delapan) pada tahun 2020 menjadi 90 (sembilan puluh) pada tahun 2024; dan
 - k. Nilai Kinerja Anggaran (NKA) DJPT (nilai), dengan target 85 (delapan puluh lima) pada tahun 2020 menjadi 89 (delapan puluh sembilan) pada tahun 2024.

C. **Pembangunan Pelabuhan Perikanan Nusantara Tanjungpandan**

Visi Pelabuhan Perikanan Nusantara Tanjungpandan

Untuk menuju sasaran jangka panjang dan tujuan hakiki dalam membangun Indonesia, pembangunan nasional lima tahun ke depan diprioritaskan pada upaya mewujudkan kedaulatan pangan, kecukupan energi, dan pengelolaan sumber daya maritim dan kelautan. Seiring dengan itu, pembangunan lima tahun ke depan juga harus makin mengarah kepada kondisi peningkatan kesejahteraan berkelanjutan, warganya berkepribadian dan berjiwa gotong royong, dan masyarakatnya memiliki keharmonisan antarkelompok sosial, dan postur perekonomian makin mencerminkan pertumbuhan yang berkualitas, yakni bersifat inklusif, berbasis luas, berlandaskan keunggulan sumber daya manusia serta kemampuan iptek sambil bergerak menuju kepada keseimbangan antarsektor ekonomi dan antarwilayah, serta makin mencerminkan keharmonisan antara manusia dan lingkungan.

Dengan mempertimbangkan masalah pokok yang ada pada lingkup Pelabuhan Perikanan Nusantara Tanjungpandan, maka visi Pelabuhan Perikanan Nusantara Tanjungpandan adalah:

“Terwujudnya Pelabuhan Perikanan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi Perikanan di Kabupaten Belitung untuk Mensejahterakan Masyarakat dan Nelayan.”

Misi Pelabuhan Perikanan Nusantara Tanjungpandan

Untuk mewujudkan visi tersebut, terdapat 4 (empat) misi yang dilakukan yaitu:

1. Mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya ikan secara berkelanjutan dan meningkatkan efisiensi usaha perikanan tangkap;
2. Meningkatkan fasilitas dan jasa untuk menyokong pertumbuhan usaha perikanan;
3. Meningkatkan pengendalian dan pengawasan penangkapan sumber daya kelautan dan perikanan;
4. Meningkatkan koordinasi pelayanan dan pelaksanaan tugas operasional.

Tujuan Pelabuhan Perikanan Nusantara Tanjungpandan

Menjabarkan misi Pelabuhan Perikanan Nusantara Tanjungpandan, maka tujuan pengelolaan Pelabuhan Perikanan Nusantara Tanjungpandan adalah:

1. Meningkatkan kualitas SDM Masyarakat perikanan tangkap, yaitu meningkatnya kapasitas dan kompetensi SDM perikanan tangkap termasuk memberdayakan nelayan
2. Peningkatan kontribusi ekonomi subsektor perikanan tangkap, yaitu:
 - a. Optimalnya integrasi pengembangan infrastruktur dan operasionalisasi Pelabuhan perikanan;
 - b. Mengembangkan armada perikanan tangkap nasional yang kompetitif dan produktif; dan
 - c. Mengakselerasi reformasi tata Kelola perizinan usaha perikanan tangkap;
3. Peningkatan keberlanjutan sumberdaya perikanan tangkap, yaitu optimalnya pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya ikan berbasis WPPNRI; dan

4. Peningkatan tata Kelola pemerintahan di lingkup DJPT, yaitu meningkatnya kinerja reformasi birokrasi DJPT secara berkualitas.

Sasaran Strategis Pelabuhan Perikanan Nusantara Tanjungpandan

Sasaran program pembangunan perikanan tangkap merupakan kondisi yang ingin dicapai oleh Pelabuhan Perikanan Nusantara Tanjungpandan sebagai suatu *outcome/impact* dari beberapa program yang dilaksanakan. Sasaran program Pelabuhan Perikanan Nusantara Tanjungpandan 2020-2024 adalah sebagai berikut:

1. Nilai PNPB Sektor Perikanan Tangkap Meningkat di Pelabuhan Perikanan Nusantara Tanjungpandan, dengan indikator kinerja:
 - a. Penerimaan PNBP di Pelabuhan Perikanan Nusantara Tanjungpandan (Rp. Juta)
2. Produktivitas Perikanan Tangkap di Pelabuhan Perikanan Nusantara Tanjungpandan, dengan indikator kinerja:
 - a. Volume Produksi Perikanan Tangkap di Pelabuhan Perikanan Nusantara Tanjungpandan (Ton)
3. Pengelolaan Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan yang Berdaya Saing di Pelabuhan Perikanan Nusantara Tanjungpandan, dengan indikator kinerja:
 - a. Dokumen Kapal perikanan yang Diterbitkan (Produk)
4. Pengelolaan Awak Kapal Perikanan yang Tersertifikasi/Terlindungi di Pelabuhan Perikanan Nusantara Tanjungpandan, dengan indikator kinerja:
 - a. Dokumen Awak Kapal Perikanan yang Diterbitkan (Produk)
 - b. Nelayan/Awak Kapal Perikanan yang Ditingkatkan Pengetahuan/Kompetensinya di Bidang Sarana Penangkapan Ikan (Orang);
5. Pengembangan dan Peningkatan Fasilitas Pelabuhan Perikanan Nusantara Tanjungpandan yang Optimal, dengan indikator kinerja:
 - a. Pelabuhan Perikanan yang Ditingkatkan Fasilitasnya untuk Mendukung Penangkapan Ikan Terukur (Unit)
6. Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Nusantara Tanjungpandan yang Berdaya Saing, dengan indikator kinerja:
 - a. Tingkat operasional Pelabuhan Perikanan Nusantara Tanjungpandan (Nilai)
7. Pengelolaan Kenelayanan yang Maju dan Berdaya Saing di Pelabuhan Perikanan Nusantara Tanjungpandan, dengan indikator kinerja:
 - a. Nelayan yang Difasilitasi Akses Pendanaan Usahanya (Orang)
8. Tata Kelola Sumberdaya Ikan di WPPNRI Perairan Laut yang Bertanggungjawab di Pelabuhan Perikanan Nusantara Tanjungpandan, dengan indikator kinerja:
 - a. Laporan Data Logbook Penangkapan Ikan yang Dikumpulkan (Laporan)
9. Tata Kelola Pemerintah yang Baik di Lingkungan Pelabuhan Perikanan Nusantara Tanjungpandan, dengan indikator kinerja:
 - a. Nilai Capaian Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK Pelabuhan Perikanan Nusantara Tanjungpandan (nilai);
 - b. Presentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Tanjungpandan (Persen);

- c. Nilai Rekonsiliasi Kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Tanjungpandan (nilai);
- d. IP ASN Pelabuhan Perikanan Nusantara Tanjungpandan (indeks);
- e. Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa Pelabuhan Perikanan Nusantara Tanjungpandan (persen);
- f. Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Pelabuhan Perikanan Nusantara Tanjungpandan (persen);
- g. Nilai IKPA Pelabuhan Perikanan Nusantara Tanjungpandan (nilai);
- h. Nilai Kinerja Anggaran Pelabuhan Perikanan Nusantara Tanjungpandan (nilai);

Adapun pada saat ini Sasaran program Pelabuhan Perikanan Nusantara Tanjungpandan mengalami perubahan sebagai berikut:

1. Nilai PNPB Sektor Perikanan Tangkap Meningkat di Pelabuhan Perikanan Nusantara Tanjungpandan, dengan indikator kinerja:
 - a. Penerimaan PNPB Non SDA di Pelabuhan Perikanan Nusantara Tanjungpandan (Rp. Juta)
2. Produksi perikanan tangkap di Pelabuhan Perikanan Nusantara Tanjungpandan meningkat, dengan indikator kinerja:
 - a. Volume Produksi Perikanan Tangkap di Pelabuhan Perikanan Nusantara Tanjungpandan (Ton)
3. Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Nusantara Tanjungpandan yang Berdaya Saing, dengan indikator kinerja:
 - a. Persentase Permohonan Perusahaan yang Dianalisa dan/atau dievaluasi di Pelabuhan Perikanan Nusantara Tanjungpandan (Persen);
 - b. Tingkat Kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Tanjungpandan (Persen);
 - c. Tingkat Pelayanan Kesyahbandaran Pelabuhan Perikanan Nusantara Tanjungpandan (Persen)
4. Pengembangan dan Peningkatan Fasilitas Pelabuhan Perikanan Nusantara Tanjungpandan yang Optimal, dengan indikator kinerja:
 - a. Persentase Pengendalian Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Perikanan Nusantara Tanjungpandan (Persen);
 - b. Persentase pengendalian Lingkungan di Pelabuhan Perikanan Nusantara Tanjungpandan (Nilai)
5. Pengelolaan Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan yang Berdaya Saing di Pelabuhan Perikanan Nusantara Tanjungpandan, dengan indikator kinerja:
 - a. Kapal Perikanan Izin Daerah yang Memenuhi Ketentuan (Kapal)
6. Pengelolaan Awak Kapal Perikanan yang Tersertifikasi/Terlindungi di Pelabuhan Perikanan Nusantara Tanjungpandan, dengan indikator kinerja:
 - a. Persentase Peningkatan Pengetahuan Kompetensi dan Perlindungan Nelayan/Awak Kapal Perikanan (Persen)
7. Tata Kelola Pemerintah yang Baik di Lingkungan Pelabuhan Perikanan Nusantara Tanjungpandan, dengan indikator kinerja:

- a. Nilai Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) Pelabuhan Perikanan Nusantara Tanjungpandan (Nilai)
- b. Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Tanjungpandan (Persen)
- c. Nilai Rekonsiliasi Kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Tanjungpandan (Nilai)
- d. Indeks Profesionalitas ASN Lingkup Pelabuhan Perikanan Nusantara Tanjungpandan (Indeks)
- e. Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa Pelabuhan Perikanan Nusantara Tanjungpandan (Persen)
- f. Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Pelabuhan Perikanan Nusantara Tanjungpandan (Persen)
- g. Nilai IKPA Pelabuhan Perikanan Nusantara Tanjungpandan (Nilai)
- h. Nilai Kinerja Anggaran Pelabuhan Perikanan Nusantara Tanjungpandan (Nilai)
- i. Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Lingkup Pelabuhan Perikanan Nusantara Tanjungpandan (Indeks)

BAB. III ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

A. Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan Kelautan dan Perikanan

Kebijakan Pembangunan Kelautan dan Perikanan 2020-2024 disusun berdasarkan Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan Nasional yang terkait dengan sektor kelautan dan perikanan. Arah dan kebijakan Kementerian Kelautan dan Perikanan disusun untuk menjabarkan misi pembangunan kelautan dan perikanan sebagai berikut:

1. Memperbaiki komunikasi dengan nelayan, evaluasi kebijakan, penyederhanaan izin, pengembangan pelabuhan, penangkapan ikan sampai dengan ZEE dan laut lepas, peningkatan pendapatan melalui akses permodalan, perlindungan dan perbaikan hidup nelayan. (DJPT)
2. Mengoptimalkan dan memperkuat perikanan budidaya untuk penyerapan lapangan kerja, peningkatan protein dan nilai tambah melalui akses permodalan, dan perlindungan usaha budidaya. (DJPB)
3. Membangkitkan industri kelautan dan perikanan melalui pemenuhan kebutuhan bahan baku industri, peningkatan kualitas mutu produk, penguatan sistem karantina ikan, peningkatan nilai tambah untuk peningkatan devisa. (DJPDS, BKIPM)
4. Pengelolaan wilayah laut, pesisir dan pulau-pulau kecil serta penguatan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan melalui koordinasi dengan instansi terkait. (DJPRL, DJPSDKP dan BKIPM)
5. Penguatan SDM dan inovasi riset kelautan dan perikanan. (BRSDM)

Untuk mencapai 5 arah kebijakan di atas, Kementerian Kelautan dan Perikanan melaksanakan kebijakan tatakelola pemerintahan yang baik yang dilakukan oleh seluruh unit kerja di pusat dan daerah. Strategi pelaksanaan arah kebijakan di atas sebagai berikut:

1. Memperbaiki komunikasi dengan nelayan, evaluasi kebijakan, penyederhanaan izin, pengembangan pelabuhan, penangkapan ikan sampai dengan ZEE dan laut lepas, peningkatan pendapatan melalui akses permodalan, perlindungan dan perbaikan hidup nelayan. Strategi yang akan dilaksanakan adalah:
 - a. Optimalisasi produktivitas sarana prasarana perikanan tangkap dengan kegiatan utama meliputi:
 - 1) Pengembangan armada perikanan, alat penangkap ikan dan alat bantu penangkap ikan yang ramah lingkungan;
 - 2) Penguatan Unit Pelaksana Teknis perikanan tangkap.

- b. Penyediaan infrastruktur perikanan tangkap yang terintegrasi dengan kegiatan utama meliputi:
 - 1) Pengembangan pelabuhan perikanan prioritas di daerah, pelabuhan perikanan berwawasan lingkungan, dan pelabuhan perikanan yang terintegrasi dengan pasar ikan bertaraf internasional (*Major Project*) dengan berkoordinasi dengan K/L terkait, Pemerintah Daerah dan Badan Usaha.
 - 2) Penguatan Unit Pelaksana Teknis perikanan tangkap; dan
 - 3) Pengembangan Sentra Kelautan Perikanan Terpadu (SKPT).
 - c. Optimalisasi pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya ikan berbasis Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) dengan kegiatan utama meliputi:
 - 1) Eksplorasi perikanan di ZEE dan laut lepas;
 - 2) Pengembangan lembaga pengelola WPP dan penguatan data stok sumberdaya ikan;
 - 3) Pengelolaan perikanan di Perairan Umum Daratan (PUD); dan
 - 4) Partisipasi dalam organisasi pengelolaan perikanan regional yang melingkupi perairan Indonesia (RFMOs).
 - d. Reformasi instrumen perizinan untuk keberlanjutan sumber daya ikan dan usaha perikanan tangkap dengan kegiatan utama meliputi: perbaikan, penataan, dan penyederhanaan perizinan usaha di pusat dan daerah, termasuk sinergi dengan instansi lain yang terkait.
 - e. Pemberdayaan usaha dan perlindungan nelayan dengan kegiatan utama meliputi:
 - 1) Fasilitasi dan pengembangan skema pembiayaan yang murah dan mudah diakses, optimalisasi peran LPMUKP;
 - 2) Peningkatan kesejahteraan, pemberdayaan nelayan, pemberdayaan kelompok nelayan perempuan, perlindungan usaha kelautan dan perikanan skala kecil, penguatan kelembagaan nelayan, dan penguatan kelompok usaha bersama melalui pembentukan korporasi nelayan (*Major Project*) berkoordinasi dengan kementerian Koperasi dan UKM dan pemerintah daerah;
 - 3) Pengembangan kampung nelayan maju, bantuan premi asuransi nelayan, perluasan skema asuransi mandiri, sertifikasi tanah nelayan; dan
 - 4) Pengaturan akses nelayan terhadap pengelolaan sumberdaya, kemudahan fasilitasi usaha dan investasi, dan pengembangan perikanan berbasis digital.
2. Perikanan budidaya dioptimalkan dan diperkuat untuk penyerapan lapangan kerja, peningkatan protein dan nilai tambah melalui akses permodalan, dan perlindungan usaha budidaya. Strategi yang akan dilaksanakan adalah:
- a. Optimalisasi perikanan budidaya air payau melalui major project “Revitalisasi tambak dikawasan sentra produksi udang dan bandeng” berkoordinasi dengan

- K/Lterkait, pemerintah daerah dan badan usaha.
 - b. Pengembangan perikanan budidaya air Laut
 - c. Pengembangan perikanan budidaya air Tawar
 - d. Pengembangan budidaya ikan hias
 - e. Pengembangan budidaya rumput laut
 - f. Pengembangan pakan mandiri
 - g. Penataan perizinan usaha budidaya pusat dan daerah (Provinsi)
 - h. Pembangunan fasilitas perbenihan
 - i. Pengelolaan kluster kawasan budidaya berkelanjutan
 - j. Produksi induk unggul dan benih bermutu
 - k. Pengujian residu produk perikanan budidaya dan sertifikasi untuk ekspor
 - l. Sertifikasi cara budidaya Ikan yang Baik (CBIB), cara perbenihan ikan yang baik(CPIB), dan cara pembuatan pakan ikan yang baik (CPPIB)
 - m. Sarana dan prasarana percontohan produksi serta usaha perikanan budidaya
 - n. Pembangunan infrastruktur perikanan budidaya antara lain meliputi saluran irigasi tambak dan keramba jaring apung
 - o. Sentra Kelautan Perikanan Terpadu (SKPT)
 - p. Sertifikasi lahan dan asuransi usaha perikanan budidaya
 - q. Penguatan UPT perikanan budidaya
3. Membangkitkan industri kelautan dan perikanan melalui pemenuhan kebutuhan bahan baku industri, peningkatan kualitas mutu produk, penguatan sistem karantina ikan, peningkatan nilai tambah untuk peningkatan devisa. Strategi yang akan dilaksanakan adalah:
- a. Pemetaan dan pemantauan logistik hasil perikanan
 - b. Penataan rantai pasok hasil perikanan dalam koridor logistik (koridor)
 - c. Pembinaan pelaku usaha perikanan dalam rangka pengadaan dan penyimpanan hasil perikanan
 - d. Pembinaan pelaku usaha perikanan dan penyedia layanan jasa logistik dalam rangka distribusi dan transportasi hasil perikanan
 - e. Sarana prasarana pengadaan dan penyimpanan ikan
 - f. Pemetaan logistik hasil Perikanan di daerah
 - g. Kampanye Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan
 - h. Keikutsertaan dalam promosi skala internasional dan investasi
 - i. Pembinaan dan Pengelolaan Pasar Ikan
 - j. Peta preferensi, konsumsi dan kebutuhan ikan konsumen dalam negeri (Provinsi)
 - k. Peta preferensi, konsumsi dan kebutuhan ikan konsumen
 - l. Pemetaan dan strategi akses pasar negara tujuan ekspor
 - m. Partisipasi daerah dalam mendukung pemasaran produk kelautan dan perikanan
 - n. Rancangan Standar Nasional Indonesia (RSNI) produk hasil KP yang dirumuskan
 - o. Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP) yang diterbitkan bagi Unit Pengolahan Ikan
 - p. Unit Penanganan dan Unit Pengolahan Produk Hasil KP yang dibina
 - q. Kebutuhan bahan baku serta peningkatan nilai tambah UPI menuju zero waste
 - r. Sarana rantai dingin dan peralatan pengolahan yang disediakan

- s. Ragam baru produk hasil kelautan dan perikanan bernilai tambah di lokasi yang dibina
 - t. Sentra Kelautan Perikanan Terpadu (SKPT)
 - u. Fasilitasi kemudahan pelaku usaha dan investasi
 - v. uji terap produk inovasi teknologi pengolahan dan pemasaran hasil kelautan dan perikanan yang dihasilkan
 - w. Sertifikasi SNI produk kelautan dan perikanan
 - x. Harmonisasi Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan
 - y. Penanganan kasus mutu ekspor impor produk perikanan yang diselesaikan
 - z. Operasional pengawasan dan penjaminan mutu hasil produk perikanan. Sarana dan prasarana pengujian mutu
4. Pengelolaan wilayah laut, pesisir dan pulau – pulau kecil serta penguatan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan melalui koordinasi dengan instansi terkait. Strategi yang akan dilaksanakan adalah:
- a. Peningkatan pengelolaan kawasan konservasi yang berkelanjutan
 - b. Peningkatan pengelolaan keanekaragaman hayati perairan yang dilindungi, dilestarikan dan/ atau dimanfaatkan
 - c. Peningkatan produksi dan usaha garam nasional
 - d. Pembangunan sarana prasarana di kawasan wisata bahari
 - e. Peningkatan jasa kelautan yang dikelola untuk pengembangan ekonomi
 - f. Peningkatan pengelolaan pulau-pulau kecil/ terluar
 - g. Masyarakat hukum adat, tradisional dan lokal di Pesisir dan PPK yang diakui dan dikuatkan kelembagaannya
 - h. Meningkatkan lokasi kawasan laut dan wilayah pesisir yang memiliki rencana zonasi yang akan ditetapkan menjadi peraturan perundangan dan/ atau rencana aksi pengelolaan
 - i. Pengelolaan Biofarmakologi
 - j. Fasilitasi perizinan pengelolaan perairan
 - k. Perairan laut antar wilayah yang memiliki dokumen RZ Kawasan Antar wilayah yang ditetapkan melalui Peraturan Perundangan dan Rencana Aksi Pengelolaan Ruang Laut
 - l. Kawasan Strategis Nasional dan Kawasan Strategis Nasional Tertentu yang Memiliki Rencana Zonasi KSN dan Rencana Zonasi KSNT yang ditetapkan Melalui Peraturan Perundangan dan Rencana Aksi Pengelolaan Ruang Laut
 - m. Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT)
 - n. Pengelolaan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan yang partisipatif, bertanggungjawab dan berkelanjutan
 - o. Pengendalian dan pengawasan SDKP yang profesional dan partisipatif
 - p. Kebijakan pembangunan kelautan dan perikanan bidang pengawasan SDKP yang efektif
 - q. Pelaku usaha pengelolaan wilayah pesisir, pulau-pulau kecil dan ruang laut yang diperiksa kepatuhannya
 - r. Unit usaha yang melakukan distribusi hasil perikanan yang diperiksa kepatuhannya
 - s. Penyadarytahuan masyarakat KP dalam pemanfaatan sumber daya perikanan yang tertib dan bertanggungjawab
 - t. Operasional Pengawasan ekspor, impor dan domestik
 - u. Harmonisasi Sistem Perkarantinaan dan Keamanan Hayati Ikan dalam dan luar

Negeri

- v. Peningkatan sarana dan prasarana pengawasan karantina
 - w. Peningkatan UPT
5. Penguatan SDM dan inovasi riset kelautan dan perikanan. Strategi yang akan dilaksanakan adalah:
- a. Hasil riset yang dimanfaatkan untuk penyusunan kebijakan dan sektor industri
 - b. Iptek hasil kegiatan riset, pendidikan, pelatihan dan penyuluhan KP yang dimanfaatkan oleh masyarakat
 - c. SDM KP peserta diklat yang terserap di di Dunia Usaha dan Dunia Industri sertamembentuk startup (usaha rintisan)
 - d. Penerapan Teknologi Adaptif Lokasi (TAL) Hasil Riset Pengolahan Produk Kelautandan Perikanan
 - e. Pembentukan kelompok kelautan dan perikanan mandiri
 - f. Pelatihan masyarakat KP yang bersertifikasi kompetensi
 - g. Pendidikan Vokasi Kelautan dan Perikanan yang Kompeten
 - h. Peningkatan sarana dan prasarana riset, pendidikan, pelatihan dan penyuluhan KP
 - i. Peningkatan UPT
6. Tatakelola pemerintahan yang baik. Strategi yang akan dilaksanakan adalah:
- a. Indeks Profesionalisme ASN
 - b. Indek SPBE
 - c. Level maturitas SPIP
 - d. Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran KKP
 - e. Opini BPK-RI atas Laporan Keuangan KKP
 - f. Nilai / Predikat Sakip KKP

Implementasi hal di atas dilakukan secara bertanggungjawab berlandaskan gotong royong, sehingga saling memperkuat, memberi manfaat dan menghasilkan nilai tambah ekonomi, sosial dan budaya bagi kepentingan bersama.

Pengarusutamaan dalam Renstra 2020-2024 Kementerian Kelautan dan Perikanan mengacu pada Dokumen RPJMN 2020-2024 yang telah menetapkan 4 (empat) pengarusutamaan (*mainstreaming*) sebagai bentuk pembangunan inovatif adaptif, sehingga dapat menjadi katalis pembangunan untuk menuju masyarakat sejahtera dan berkeadilan. Keempat *mainstreaming* ini akan mewarnai dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam pembangunan sektor dan wilayah, dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan dan memastikan pelaksanaannya secara inklusif. Selain mempercepat pencapaian target-target dari fokus pembangunan, pengarusutamaan ini juga bertujuan untuk memberikan akses pembangunan yang merata dan adil dengan meningkatkan efisiensi tata kelola dan juga adaptabilitas terhadap faktor eksternal lingkungan. Arah kebijakan pengarusutamaan pembangunan kelautan dan perikanan 2020-2024 dijabarkan sebagai berikut:

1. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

TPB/SDGs mencakup 17 Tujuan/Goal, 169 target, dan 241 indikator. Dalam melaksanakan TPB/SDGs, diperlukan keterkaitan antardimensi pembangunan yang saling berpengaruh. Dimensi pembangunan yang dimaksud meliputi dimensi sosial, ekonomi, dan lingkungan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat terpisahkan. KKP akan memperkuat komitmen pelaksanaan target TPB 14 Ekosistem Lautan (*Life Below Water*) yang mencakup diantaranya: 1) Mengurangi pencemaran laut termasuk sampah laut; 2) Mengelola dan melindungi ekosistem laut dan pesisir secara berkelanjutan; 3) Meminimalisasi dan mengatasi dampak pengasaman laut; 4) Mengatur kuota penangkapan per wilayah agar sumber daya ikan tetap berkelanjutan; 5) Melestarikan wilayah pesisir dan laut; 6) Mengatur subsidi perikanan agar tidak berkontribusi terhadap kelebihan kapasitas dan penangkapan ikan berlebih; 7) Meningkatkan manfaat ekonomi atas pemanfaatan berkelanjutan sumber daya laut termasuk melalui pengelolaan perikanan, budidaya air dan pariwisata berkelanjutan; 8) Meningkatkan pengetahuan ilmiah, mengembangkan kapasitas penelitian dan alih teknologi kelautan; 9) Menyediakan akses untuk nelayan skala kecil terhadap sumber daya laut dan pesisir; dan 10) Meningkatkan pelestarian dan pemanfaatan berkelanjutan lautan dan sumber dayanya dengan menetapkan hukum internasional yang tercermin dalam the *United Nation Convention on the Law of the Sea* (UNCLOS).

2. Gender

Pengarusutamaan gender diarahkan untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender di berbagai sektor dalam pembangunan, dengan strategi meningkatkan peran, akses, kontrol dan manfaat gender dalam pembangunan kelautan dan perikanan. Strategi yang akan dilakukan adalah percepatan pelaksanaan pengarusutamaan gender di semua bidang pembangunan di tingkat pusat, dan daerah, yang mencakup:

1) Penguatan 7 prasyarat PUG: komitmen, kebijakan, kelembagaan, sumber daya, data terpilah, alat analisis, partisipasi masyarakat; 2) Penerapan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG); 3) Penyiapan roadmap PUG; 4) Pengembangan model pelaksanaan PUG terintegrasi antar unit eselon I di KKP dan antar pusat-daerah; 5) Pembuatan profil gender; dan 6) Monitoring dan evaluasi serta pengawasan Pengarusutamaan Gender (PUG) KKP.

3. Modal Sosial Budaya

Pengarusutamaan modal sosial budaya merupakan internalisasi nilai dan pendayagunaan kekayaan budaya untuk mendukung seluruh proses pembangunan. Pengetahuan tradisional (*local knowledge*), kearifan local (*local wisdom*), pranata sosial di masyarakat sebagai penjelmaan nilai-nilai sosial budaya komunitas harus menjadi pertimbangan dalam proses perencanaan serta penyusunan kebijakan dan program pembangunan nasional. Pengarusutamaan

sosial-budaya ini bertujuan dan berorientasi pada penghargaan atas khazanah budaya masyarakat, sekaligus upaya pelestarian dan pemajuan kebudayaan bangsa.

Pembangunan kebudayaan ingin memastikan bahwa setiap penduduk memperoleh perlindungan hak kebudayaan dan kebebasan berekspresi untuk memperkuat kebudayaan yang inklusif. Peningkatan pembangunan inklusif dan berwawasan budaya lingkup KKP, diantaranya adalah 1) Pelaksanaan pembangunan yang mengindahkan nilai budaya, kearifan lokal dan keragaman SDA hayati; 2) Pengembangan dan penguatan budaya bahari dan literasi bahari; dan 3) Pemberdayaan masyarakat adat pesisir dan pulau-pulau kecil.

4. Transformasi Digital

Pengarustamaan transformasi digital merupakan upaya untuk mengoptimalkan peranan teknologi digital dalam meningkatkan daya saing bangsa dan sebagai salah satu sumber pertumbuhan ekonomi Indonesia ke depan. Strategi pengarustamaan transformasi digital terdiri dari aspek pemantapan ekosistem (*supply*), pemanfaatan (*demand*) dan pengelolaan *big data*.

Penyiapan layanan digital terintegrasi lingkup KKP yang mencakup penyiapan regulasi, penguatan kelembagaan, pembangunan jaringan, sarpras, meningkatkan kapasitas SDM dengan keahlian digital, melakukan kerja sama untuk menyediakan layanan digital dan *one data* serta penataan sistem perizinan berbasis web (*online*), termasuk penerapan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE) dan peningkatan usaha kelautan dan perikanan melalui *e-commerce*.

B. Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan Perikanan Tangkap

Pendekatan Konseptual

Pembangunan sebuah sub sektor harus mulai dikembangkan ke dalam proses yang lebih dinamis; mempertimbangkan isu terkini serta berupaya mengantisipasi tantangan di masa mendatang untuk mencapai sebuah tujuan pembangunan. Selain itu dalam kerangka sistem perencanaan nasional, pembangunan sebuah sub sektor juga sudah seharusnya memiliki referensi yang erat dengan pembangunan pada skala yang lebih luas yakni sektoral maupun nasional.

Arah kebijakan dan strategi pembangunan perikanan tangkap terutama dilaksanakan untuk mendukung pembangunan nasional pada agenda 1 “memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan” dan agenda 2 “mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan & menjamin pemerataan”. Agenda penguatan ketahanan ekonomi akan diwujudkan melalui pengelolaan sumber daya ekonomi yang mencakup pemenuhan pangan, serta akselerasi peningkatan nilai tambah.

Adapun agenda pengembangan wilayah akan diwujudkan melalui keterpaduan pembangunan dengan memperhatikan pendekatan spasial yang didasarkan bukti data, informasi dan pengetahuan yang baik, akurat dan lengkap.

Bisnis proses perikanan tangkap merupakan sebuah sistem yang menjelaskan bagaimana usaha perikanan tangkap berjalan, mulai dari penjabaran kegiatan input, interaksi antar kegiatan, sampai pada alur pencapaian output dari pembangunan sub-sektor perikanan tangkap. Bisnis proses juga biasanya mengidentifikasi keterlibatan *stakeholder* serta menjelaskan hubungan keterkaitannya. Dengan demikian hal tersebut menegaskan kembali bahwa dalam konteks perencanaan strategis pembangunan perikanan tangkap, penyertaan kerangka bisnis proses sebagai dasar menjadi bersifat mutlak.

Mengacu pada perkembangan terkini konsep pengelolaan perikanan, manajemen perikanan tangkap akan diperspektifkan ke dalam 3 aspek utama yakni: 1) Manajemen nelayan; 2) Manajemen sumber daya ikan; serta utilisasi keduanya melalui 3) Manajemen usaha penangkapan ikan, yang dijabarkan sebagai berikut:

1. Manajemen Nelayan

Manajemen nelayan terdiri dari 2 komponen utama pembentuk yakni dukungan terhadap usaha perikanan nelayan serta dukungan terhadap *social security* nelayan. Dukungan usaha perikanan bertujuan untuk mengakselerasi usaha penangkapan ikan yang dilakukan oleh nelayan, seperti misalnya perbaikan mindset, peningkatan kapasitas terhadap penggunaan teknologi, serta fasilitasi akses pendanaan.

Adapun dukungan terhadap *social security* bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dasar keluarga nelayan, melalui diversifikasi usaha serta fasilitasi penyaluran jaminan kesehatan, pendidikan, maupun perbaikan lingkungan permukiman nelayan. Manajemen nelayan mencakup berbagai komponen kegiatan pada kegiatan kenelayanan.

2. Manajemen Sumber Daya Ikan

Manajemen sumber daya ikan terdiri dari 2 komponen utama pembentuk yakni pengaturan alokasi (sumber daya ikan dan izin) serta pemantauan pelaksanaan perizinan. Pengaturan alokasi mencakup instrumen pengalokasian SDI dan izin oleh pemerintah pusat serta proses pemberian izin baik oleh pemerintah pusat, daerah, maupun upaya integrasi izin pusat-daerah.

Adapun pemantauan pelaksanaan perizinan dilakukan melalui instrumen penerapan e- logbook, penempatan observer, serta peningkatan kepatuhan pada laporan LKU-LKP. Optimalisasi manajemen sumber daya ikan, utamanya akan dapat tercapai seiring konsep pengelolaan berbasis WPP diterapkan secara penuh. Manajemen sumber daya ikan mencakup berbagai komponen kegiatan pada kegiatan pengelolaan sumber daya ikan dan kegiatan pengelolaan perizinan.

3. Manajemen Usaha Penangkapan Ikan

Manajemen usaha penangkapan ikan berisi segala mekanisme terkait pengaturan pemanfaatan sumber daya ikan oleh nelayan, sehingga sifatnya merepresentasikan irisan antara manajemen sumber daya ikan dan manajemen nelayan. Selain itu, manajemen usaha penangkapan ikan juga dapat dianggap sebagai ujung tombak sinergi antara penyediaan supply (sumber daya ikan) dan pemenuhan demand (hasil tangkapan ikan).

Mengacu pada peran strategis tersebut, manajemen usaha penangkapan ikan sebenarnya menjadi tahapan yang paling penting dalam mencapai berbagai outcome pembangunan perikanan tangkap, yakni meliputi peningkatan kelestarian sumber daya ikan, pendapatan nelayan, daya saing hasil tangkapan, kontribusi ekonomi langsung, serta *multiplier effect* lainnya. Manajemen sumber daya ikan mencakup berbagai komponen kegiatan pada kegiatan pengelolaan pelabuhan perikanan, dan kegiatan pengelolaan kapal perikanan dan alat penangkapan ikan.

Semakin tingginya faktor permintaan terhadap produk perikanan serta adanya potensi keterbatasan dukungan ekosistem perikanan, seringkali semakin mendorong ketidakseimbangan terhadap usaha penangkapan ikan yang ideal. Pembelajaran pada periode pembangunan sebelumnya tahun 2015-2019 semakin memperlihatkan bahwa tren pengelolaan perikanan tangkap di masa mendatang akan semakin mengerucut pada permasalahan *supply* dan *demand*. Untuk memenuhi keseimbangan *supply-demand* tersebut, hubungan 3 aspek utama dalam konsep manajemen perikanan harus berjalan secara seimbang, yakni antara aspek sosial, ekonomi serta aspek lingkungan ataupun seringkali direpresentasikan melalui hubungan antara *stakeholder* nelayan, pengusaha, dengan pemerintah (Gambar 4). Penggunaan pendekatan *supply-demand* juga dilakukan dalam rangka mewujudkan arah kebijakan utama industrialisasi sektor kelautan dan perikanan yang telah dicanangkan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan.

Gambar 2. Implementasi Pendekatan Supply-Demand terhadap Manajemen Perikanan Tangkap



C. Arah Kebijakan dan Strategi

Secara khusus, kebijakan Menteri Kelautan dan Perikanan pada pembangunan sub sektor perikanan tangkap diarahkan untuk memperbaiki komunikasi dengan nelayan, evaluasi kebijakan, penyederhanaan izin, pengembangan pelabuhan, penangkapan ikan sampai dengan ZEE dan laut lepas, serta peningkatan pendapatan melalui akses permodalan, perlindungan dan perbaikan hidup nelayan.

Untuk melaksanakan arah kebijakan tersebut di atas, Ditjen Perikanan Tangkap telah melakukan penterjemahan arah kebijakan pembangunan perikanan tangkap ke dalam 2 arah kebijakan yakni 1) Kebijakan Pokok dan 2) Kebijakan Pengarusutamaan, termasuk berbagai indikasi strategi pelaksanaan, serta penetapan kegiatan prioritas di dalamnya.



Gambar 3. Pendekatan Perencanaan Strategis Sub Sektor Perikanan Tangkap, Arah Kebijakan Utama, Serta Kegiatan Prioritas Tahun 2020-2024

1. Kebijakan Pokok

- a. Membuka komunikasi dengan stakeholder untuk harmonisasi kebijakan berbasis data, informasi dan pengetahuan yang faktual

Kebijakan ini dilakukan melalui pendekatan: 1) Kajian atas regulasi dalam rangka percepatan investasi sub bidang perikanan tangkap; 2) Konsultasi publik dengan stakeholder untuk perumusan kebijakan; 3) Pendekatan ilmiah/akademik berbasis data dan pengetahuan faktual dalam perumusan kebijakan; 4) Koordinasi dengan Kementerian Koordinator dan laporan kepada Menteri Kelautan dan Perikanan untuk penetapan kebijakan perikanan tangkap; 5) Kunjungan kerja dan diskusi stakeholders di pelabuhan perikanan dan sentra nelayan. Arah kebijakan ini dilakukan dengan basis pendekatan data faktual, keterbukaan informasi secara bertanggungjawab berbasis website dan transparansi, dan berbasis riset dan pengetahuan faktual.

- b. Pengelolaan Sumber Daya Perikanan Tangkap yang berkelanjutan.

Pengelolaan perikanan tangkap dilakukan melalui peningkatan efektivitas tata kelola sumber daya perikanan yang bertanggung jawab dan berkelanjutan, dilaksanakan langkah-langkah sebagai berikut:

- 1) Optimalisasi Produktivitas Sarana Prasarana Perikanan Tangkap

Utamanya akan dilakukan melalui utilisasi armada perikanan tangkap sebagai sarana prasarana utama produksi. Operasional kapal perikanan, selektivitas penggunaan alat penangkapan ikan, serta kapasitas awak kapal perikanan dapat dianggap sebagai ujung tombak dalam upaya menciptakan pengelolaan perikanan yang seimbang. Dalam hal ini artinya diharapkan perangkat armada perikanan tangkap tersebut, bukan hanya mampu menghasilkan volume produksi yang tinggi, namun juga produk perikanan yang lebih berdaya saing, serta sekaligus dapat menjaga stabilitas ekosistem perikanan dan daya dukung lingkungan.

Tingginya peluang pemanfaatan sumber daya perikanan di wilayah perairan Indonesia, serta rencana akselerasi di ZEEI dan laut lepas perlu direspon melalui konsep industrialisasi sarana-prasarana penangkapan ikan, yakni meliputi: peningkatan efisiensi-kemampuan jangkauan operasional, kualitas hasil tangkapan, serta jaminan ketenagakerjaan. Sistem manajemen armada pun (pendaftaran, penandaan, persetujuan dan evaluasi operasional) perlu diperkuat pada lingkup nasional untuk dapat mewujudkan konsep industrialisasi yang berkelanjutan.

Restrukturisasi armada perikanan harus menciptakan kinerja yang lebih efisien melalui adopsi teknologi ramah lingkungan yang telah teradaptasi kearifan lokal. Pelibatan masyarakat dalam setiap proses pengelolaan pun perlu ditingkatkan sehingga secara tidak langsung dapat meningkatkan pemahaman maupun kapasitas nelayan dalam pemanfaatannya.

Dalam upaya mewujudkan optimalisasi produktivitas sarana prasarana perikanan tangkap, beberapa indikasi kegiatan secara spesifik diarahkan untuk:

- a) Restrukturisasi dan modernisasi kapal perikanan, alat penangkapan ikan, mesin dan alat penangkapan ikan;
- b) Peningkatan produktivitas penggunaan alat penangkapan ikan dan alat bantu penangkapan ikan yang ramah lingkungan;
- c) Peningkatan standarisasi kapal perikanan yang memenuhi aspek laik tangkap dan laik simpan, termasuk pemanfaatan energi terbarukan;
- d) Peningkatan standar rancang bangun, keselamatan dan keamanan kerja di kapal perikanan;
- e) Peningkatan nilai ekonomi ikan hasil tangkapan melalui peningkatan kualitas penanganan ikan di atas kapal perikanan (CPIB);
- f) Manajemen tata kelola (pendaftaran, penandaan, persetujuan pembangunan kapal dan pemantauan operasional) kapal perikanan nasional secara elektronik dan terintegrasi;
- g) Optimalisasi dan mekanisasi penangkapan ikan dengan penerapan rekayasa teknologi penangkapan pada alat penangkapan ikan, alat bantu penangkapan ikan dan armada perikanan tangkap; dan
- h) Perlindungan dan peningkatan kapasitas awak kapal perikanan dan perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) bidang perikanan untuk meningkatkan kesejahteraan awak kapal perikanan.

Lingkungan strategis yang perlu diperhatikan
1. Pengembangan industri perkapalan nasional, untuk mendukung pergerakan industri perikanan nasional;
2. Intensifikasi tata kelola kapal perikanan nasional, khususnya pada kapal izin daerah dan kapal perikanan swasta;
3. Peningkatan keterlibatan pada tata kelola awak kapal perikanan;
4. Peningkatan manajemen data armada perikanan nasional.

2) Penyediaan Infrastruktur Perikanan Tangkap yang Terintegrasi

Implementasi pengembangan infrastruktur berdasarkan bisnis proses usaha perikanan tangkap menjadi kunci utama dalam mewujudkan industrialisasi; dengan mengedepankan outcome berupa efisiensi pengelolaan dan nilai tambah hasil tangkapan ikan. Sinergi pengembangan infrastruktur diarahkan bukan hanya bersifat antar sektor, melainkan juga antar wilayah, serta diperkuat dengan peningkatan konektivitas melalui intensifikasi teknologi informasi dengan basis data yang lebih akurat. Secara umum arah kebijakan ini dimaksudkan untuk mendorong sistem infrastruktur perikanan tangkap yang terintegrasi dari hulu ke hilir, bermutu dan berdaya saing; termasuk integrasinya dengan sektor terkait, seperti industri, jasa, dan

perhubungan/transportasi.

Pengelolaan berbasis WPP pun mendorong secara spesifik peran infrastruktur perikanan tangkap, utamanya pelabuhan perikanan untuk semakin diarahkan sebagai sentra lokasi dari setiap kegiatan perikanan tangkap di setiap WPP, serta untuk semakin mewujudkan konektivitas logistik ikan baik untuk pasar dalam negeri maupun luar negeri. Artinya pelabuhan perikanan mulai memiliki tanggung jawab kewilayahan dalam menjalankan fungsinya. Untuk mendukung hal tersebut, melalui kegiatan prioritas “Pelabuhan Perikanan Unggul”, fasilitas pelabuhan perikanan akan terus dikembangkan pada tahap lebih lanjut, serta ditingkatkan perannya.

Dalam upaya penyediaan infrastruktur perikanan tangkap yang terintegrasi, beberapa indikasi kegiatan secara spesifik diarahkan untuk:

- a) Peningkatan mutu ikan dan penerapan standarisasi ramah lingkungan melalui *Eco Fishing Port*, termasuk didalamnya penguatan instrumen SHTI;
- b) Penguatan SDM dan fungsi kesyahbandaran; intensifikasi pelibatan pemerintah daerah;
- c) Standarisasi ketersediaan-kualitas fisik sarana prasarana, operasional, fungsi pelayanan (ISO-9001), serta penetapan aspek hukum di wilayah kerja pelabuhan perikanan (WKOPP);
- d) Peningkatan sinergi bisnis perikanan terutama dengan sistem pengolahan dan pemasaran, termasuk melalui integrasinya dengan pasar ikan bertaraf internasional;
- e) Peningkatan keterpaduan pelabuhan perikanan UPT pusat dan UPTD dalam mengimplementasikan Rencana Induk Pelabuhan Perikanan (RIPPN); baik dari aktivitas, data dan informasi, serta peningkatan konektivitasnya melalui sistem IT, termasuk melalui pengembangan pelabuhan perikanan prioritas di daerah maupun alternatif peningkatan kelembagaannya;
- f) Penguatan manajemen risiko fasilitas, termasuk terhadap faktor alam (pendangkalan, bencana alam); dan
- g) Peningkatan fungsi operasional SKPT Merauke, SKPT Natuna, SKPT Sebatik, dan SKPT Saumlaki.

Lingkungan strategis yang perlu diperhatikan
<ol style="list-style-type: none"> 1. Alternatif pembiayaan dalam pembangunan fisik infrastruktur pelabuhan perikanan; 2. Sinergitas beberapa regulasi sebagai landasan pengembangan PP; terkait a) Pemerintahan Daerah, khususnya pada proses pengalihan P3D (Personel, Pendanaan, Sarana dan Prasarana serta Dokumen) PP dan b) RZWP3K (Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil); 3. Optimalisasi peningkatan peran PP sebagai sentra ekonomi dan pusat aktivitas nelayan; utamanya untuk memudahkan fungsi kontrol pemerintah; 4. Intensifikasi tata kelola pengembangan PP secara nasional, baik yang melalui penganggaran APBN KKP, DAK, APBD maupun swasta.

3) Optimalisasi Pemanfaatan dan Pengelolaan sumber daya ikan berbasis Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP)

Inisiasi pengelolaan perikanan berbasis WPP telah dilakukan sejak satu dekade terakhir, namun operasionalisasinya belum optimal. Padahal sampai dengan saat ini instrumen kelengkapannya tergolong telah siap, mulai dari Rencana Pengelolaan Perikanan (RPP), Lembaga Pengelola Perikanan (LPP), infrastruktur dasar, maupun mekanisme pengaturan lainnya. Pengelolaan berbasis WPP diarahkan untuk berperan sebagai management authority yang mempunyai kewenangan penuh dalam mengelola WPP, khususnya dalam pelaksanaan dan evaluasi RPP. Termasuk didalamnya menyelesaikan isu-isu pengelolaan perikanan, serta sebagai wadah koordinasi dan sinergi dari pengelolaan perikanan di masing-masing WPP.

Upaya pemanfaatan sumber produksi akan terus didorong dari lokus-lokus potensial yang selama ini belum optimal intervensinya, seperti pada wilayah perairan umum daratan; mempertimbangkan tidak sedikit daerah yang secara geografis memiliki banyak wilayah perairan umum daratan seperti sungai dan danau. Selain itu semakin strategisnya posisi Indonesia pada sistem perikanan global sekaligus pertimbangan terhadap kedaulatan NKRI, pemanfaatan usaha penangkapan ikan di ZEEI dan laut lepas juga akan lebih diakselerasi, khususnya pada komoditas unggulan seperti tuna, cakalang, tongkol. Di sisi lainnya peningkatan sistem jaminan ketelusuran terus didorong melalui perluasan cakupan penerapan e-logbook serta penempatan observer on board pada kapal perikanan.

Dalam upaya optimalisasi pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya ikan berbasis Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP), beberapa indikasi kegiatan secara spesifik diarahkan untuk:

- a) Peningkatan operasionalisasi lembaga WPP dalam pengawasan,

- pengalokasian SDI, sinergi pembangunan pusat-daerah dan antar-daerah, serta penyelesaian isu kewilayahan termasuk nelayan andon;
- b) Peningkatan kepatuhan pelaku usaha melalui kepatuhan pelaksanaan e-logbook secara nasional untuk kapal > 5 GT, serta perluasan cakupan observer di atas kapal perikanan;
 - c) Penguatan basis pengalokasian sumber daya ikan, sebagai dasar optimalisasi pemanfaatan;
 - d) Peningkatan produktivitas perairan umum daratan, melalui perluasan cakupan pendataan serta pengembangan LP3D (Lembaga Pengelolaan Perikanan Perairan Darat);
 - e) Peningkatan produktivitas ZEEI dan laut lepas, khususnya melalui pemanfaatan investasi tuna, cakalang, tongkol; serta mendorong kerjasama bilateral, regional dan internasional, khususnya pada forum RFMO; dan
 - f) Mendorong sertifikasi dan sistem ketertelusuran (*traceability*) hasil tangkapan ikan.

Lingkungan strategis yang perlu diperhatikan
1. Penguatan basis data pengalokasian SDI; intensifikasi koordinasi dengan otoritas penyusun stok SDI dan akademisi (<i>backward linkage</i>);
2. Penguatan fungsi manajemen pemanfaatan SDI melalui pengendalian perairan overfishing dan optimalisasi perairan underfishing; Intensifikasi koordinasi dengan unit kerja pemanfaatan usaha (<i>forward linkage</i>), seperti dalam alokasi izin, kapal, dan pengembangan PP;
3. Intensifikasi koordinasi dengan Pemda terkait operasionalisasi WPP, penyelesaian andon, pemanfaatan perairan umum daratan.

- 4) Reformasi instrumen perizinan untuk keberlanjutan sumber daya ikan dan usaha perikanan tangkap

Upaya pemberantasan *Illegal, Unreported, and Unregulated Fisheries* (IUUF) sejauh ini telah terbukti mampu berkontribusi pada pemulihan stok sumber daya. Melanjutkan momentum baik tersebut, perizinan didorong untuk menjadi instrumen pengakselerasi usaha (dengan otoritas pemerintah terus melakukan penyederhanaan sistem) yang bertanggungjawab (dengan pelaku usaha semakin tertib aturan).

Dalam rangka mendukung pengelolaan berbasis WPP, alokasi dan evaluasi izin dari otoritas nasional harus menjadi acuan dasar untuk diaplikasikan secara ketat, termasuk di tingkat daerah. Sebagai langkah awal, upaya integrasi perizinan perlu diintensifkan, yakni antar K/L (KKP dan Kemenhub) maupun antara pusat-daerah (KKP dan Pemda). Dengan cakupan pengaturan yang luas dan bersifat antar kewenangan tersebut, pematkhiran penggunaan *e-service*

dan *platform* yang terintegrasi perlu terus didorong untuk membangun sistem perizinan yang real-time, transparan, dan terukur.

Dalam upaya mengimplementasikan reformasi instrumen perizinan untuk keberlanjutan sumber daya ikan dan usaha perikanan tangkap, beberapa indikasi kegiatan secara spesifik diarahkan untuk:

- a) Peningkatan dan penyebarluasan SILAT;
- b) Sinergi mekanisme perizinan usaha penangkapan ikan dengan Kemenhub, termasuk upaya integrasi maupun intensifikasi pelaksanaan gerai di daerah;
- c) Sinergi sistem perizinan pusat dan daerah yang lebih tertata;
- d) Pemutakhiran dan peningkatan inovasi pelaksanaan *e-services*;
- e) Peningkatan kepatuhan pelaku usaha terhadap pelaporan usaha perikanan tangkap; dan
- f) Implementasi perizinan berdasarkan alokasi usaha penangkapan ikan.

Lingkungan strategis yang perlu diperhatikan
1. Sinergitas regulasi terkait Pemerintahan Daerah; kewenangan perizinan dan penerbitan BPKP oleh pemerintah daerah
2. Sinergitas peraturan daerah (Perda) terkait sistem perizinan, dalam upaya mengintegrasikan sistem perizinan pusat-daerah
3. Inovasi teknologi dalam pelaporan usaha untuk meningkatkan kualitas data pemanfaatan SDI dan potensi pendapatan negara

5) Pemberdayaan usaha dan perlindungan nelayan

Mengacu pada pembelajaran sebelumnya bahwa program bantuan sebenarnya secara akumulatif dapat berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan nelayan, namun dengan beberapa catatan seperti perlunya pelibatan aktif pemerintah daerah maupun nelayan itu sendiri. Dengan demikian kedepannya program serupa perlu didorong agar lebih memperhatikan perspektif stakeholder utama nelayan serta memposisikan DJPT bukan hanya sebagai pelaksana lapangan, melainkan juga koordinator dari sistem perlindungan nelayan yang lebih luas.

Pada dasarnya pemenuhan *social security* masih menjadi kebutuhan mendasar bagi masyarakat miskin, termasuk nelayan. Kebutuhan biaya hidup sehari-hari, kesehatan, pendidikan keluarga, serta perbaikan lingkungan, mendorong nelayan untuk memiliki tingkat ketergantungan yang tinggi dari hasil penangkapan ikan. Sehingga secara psikologis, nelayan akan sangat sensitif terhadap segala perubahan sistem yang dapat mempengaruhi tingkat penghasilannya. Pemenuhan kebutuhan dasar dimaksudkan juga agar nelayan lebih resisten terhadap ketidakpastian usaha penangkapan ikan, sekaligus

untuk membentuk jaring pengaman sosial yang kuat dalam menghadapi berbagai situasi *force majeure* seperti bencana alam.

Dalam hal ini peran DJPT perlu dipertegas yakni untuk memfasilitasi peningkatan usaha nelayan serta sebagai koordinator/penyedia data kenelayanan yang akurat untuk memfasilitasi bantuan antar sektor. Peran nelayan maupun pemerintah daerah pun perlu disinergikan untuk dapat mengidentifikasi kebutuhan nelayan secara tepat maupun mencegah timbulnya perbedaan persepsi antara nelayan dan pemerintah.

Dalam upaya pemberdayaan usaha dan perlindungan nelayan, beberapa indikasi kegiatan secara spesifik diarahkan untuk:

- a) Peningkatan kualitas hidup nelayan melalui pengembangan kampung nelayan maju;
- b) Perlindungan dan bantuan nelayan melalui bantuan premi asuransinelayan, termasuk perluasan skema asuransi mandiri, bantuan sarana penangkapan ikan, dll;
- c) Pemberdayaan kapasitas nelayan terhadap risiko mata pencaharian melalui diversifikasi usaha, peningkatan kewirausahaan serta literasi manajemen keuangan;
- d) Peningkatan kerjasama dalam pemenuhan kebutuhan dasar dari aspek permukiman (KemenPUPR), kesehatan (Kemenkes), Pendidikan (Kemendikbud), lingkungan (KemenLHK), dll;
- e) Penguatan kapasitas kelembagaan usaha nelayan; inovasi akses permodalan dan intensifikasinya termasuk melalui akses LPMUKP dan sertifikasi hak atas tanah nelayan, serta inisiasi pengembangan korporasi nelayan; dan
- f) Penguatan informasi kenelayanan melalui intensifikasi pelibatan daerah dan komunikasi dengan nelayan.

Lingkungan strategis yang perlu diperhatikan
1. Penguatan database kenelayanan untuk menjaring kerjasama pemberdayaan-perlindungan nelayan dengan lintas sektor, pemda, swasta;
2. Penguatan jalur & mekanisme komunikasi dengan nelayan untuk pemetaan kebutuhan nelayan secara tepat dan responsif;
3. Mengarusutamakan nelayan sebagai subjek pemberdayaan, melalui perubahan mindset dan kapasitas nelayan untuk mandiri; bukan lagi hanya sebagai objek.

- c. Reformasi Birokrasi DJPT menuju birokrasi yang lebih berkualitas

Reformasi birokrasi dilakukan dalam rangka implementasi RB DJPT berdasarkan prioritas dan kepentingan nasional yang dilakukan melalui 5 pendekatan, yaitu: 1) *Human Capital*; 2) *Organisation Capital (Right Sizing Organisation)*; 3) *Finacial and*

Planning Capital; 4) Information Capital, serta 5) Control Capital.

Di masa mendatang, tantangan sub-sektor perikanan tangkap diprediksi akan semakin besar, baik pada lingkup sektoral maupun global. Dengan demikian maka peran organisasi kesekretariatan perlu didorong bukan hanya terfokus pada fungsi administratif kesekretariatan saja melainkan juga mulai memperkuat fungsi sebagai unit kerja *think-tank*; berperan dalam memberikan berbagai saran- pertimbangan, memberikan respon cepat (*quick analysis*), serta mengembangkan teori dan model pembangunan perikanan tangkap. Kesekretariatan juga perlu lebih membuka diri untuk mempermudah koordinasi lintas sektor.

Dalam rangka mendukung hal tersebut, beberapa strategi secara spesifik diarahkan untuk: 1) Peningkatan inovasi program; 2) Intensifikasi manajemen berbasis IT; 3) Peningkatan skala kerjasama bidang perikanan tangkap baik dilingkup KKP (antar Eselon I) maupun Nasional (antar K/L, Pemda, BUMN, swasta); 4) Penerbitan peraturan terkait proses bisnis perikanan yang berkeadilan dan berkelanjutan; 5) Harmonisasi dan revisi regulasi terkait; dan 6) Penguatan manajemen data, dengan pendataan yang lebih menyeluruh.

K/L LAIN	PEMDA	KKP
PU-PERA Jalan / Rumah / Dermaga Pelabuhan / air bersih	Penyiapan lahan	Tata ruang/zonasi/masterplan
KEMEN-ATR Sertifikasi Tanah Nelayan	Identifikasi permasalahan di daerah	Sarana Sistem Rantai Dingin
KEMENDAGRI Percepatan P3D, sinergi pusat-daerah	Identifikasi / pengurusan administrasi / penyaluran bantuan	Penyuluhan, Pelatihan, Penguatan kelembagaan kelompok
KEMEN-KOPERASI Pembentukan / Pembinaan Koperasi	Manajemen data kenelayanan	Riset teknologi perikanan tangkap
KEMHUB Pengukuran GT, dokumen kapal	Partisipasi pada forum kelembagaan WPP	Pengawasan SDKP
KEMENDES Sinergi dana desa, desa nelayan	Sinergi pembiayaan kegiatan prioritas nasional di daerah	Sarana Pemasaran
KEMENKOMAR Koordinasi / sinkronisasi, peluang investasi	Menggalang dukungan pembangunan dari pihak swasta maupun pihak lainnya	BUMN
	Integrasi sistem perizinan	Swasta
	Pengembangan pelabuhan	

Gambar 4. Pemetaan Dukungan Stakeholder Potensial terhadap Pembangunan Perikanan Tangkap

2. Kebijakan Pengarusutamaan

a. Tujuan Pembangunan berkelanjutan

Strategi pelaksanaan meliputi: 1) Penerapan konsep ekonomi hijau; 2) Penerapan konsep *eco fishing port*; 3) Alternatif penggunaan bahan bakar gas untuk kapal perikanan; 4) Inovasi teknologi API ramah lingkungan.

b. Gender

Strategi pelaksanaan dilakukan melalui penguatan peran wanita nelayan dalam usaha perikanan tangkap.

c. Modal sosial budaya

Strategi pelaksanaan dilakukan melalui pengaplikasian kearifan lokal dalam kegiatan penangkapan ikan dan pemberdayaan nelayan.

d. Transformasi digital

Strategi pelaksanaan dilakukan melalui penggunaan teknologi dalam sistem pemerintahan (*e-logbook, e-services perizinan, e-layar, dll*).

Untuk mengakselerasi pencapaian arah kebijakan tersebut, Ditjen Perikanan Tangkap telah menginisiasi beberapa kegiatan prioritas yang diharapkan dapat menjadi kunci, memberikan *multiplier effect* pada kegiatan lainnya, serta menghasilkan dampak langsung pada stakeholder. Kegiatan prioritas tersebut meliputi implementasi Sistem Informasi Izin Layanan Cepat (SILAT), pemanfaatan investasi tuna, cakalang, tongkol, penyederhanaan regulasi perikanan tangkap, pengembangan pelabuhan perikanan unggul, pengembangan Kampung Nelayan Maju (KALAJU), serta armada perikanan yang kompetitif. Kegiatan prioritas setidaknya bersifat, namun tidak terbatas, sebagai akselerator setiap arah kebijakan serta terdapat unsur inovasi didalamnya. Kegiatan lainnya yang mengacu pada beberapa pertimbangan seperti dukungan legislatif dan berbagai kebijakan pimpinan lainnya masih dapat dikategorikan sebagai kegiatan prioritas dalam konteks pembangunan perikanan tangkap secara utuh.

Kegiatan Prioritas DJPT	Gambaran Umum
Sistem Informasi Izin Layanan Cepat (SILAT)	Merupakan platform pengajuan izin usaha perikanan tangkap yang memungkinkan penerbitan izin dilakukan hanya dalam waktu 1 jam, dan keseluruhan prosesnya dilakukan secara online. Intensifikasi penggunaan serta berbagai pemutakhiran sistem perizinan masih terus akan dilakukan. Upaya reformasi perizinan ini merupakan salah satu gebrakan untuk meningkatkan pelayanan publik serta dimaksudkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan memperbaiki iklim investasi perikanan tangkap
Pemanfaatan investasi tuna, cakalang, tongkol	Peluang pemanfaatan investasi tuna diprediksi dapat mencapai Rp 7 Triliun. Seiring upaya diplomasi yang terus diintensifikasi dengan pengelola perikanan regional-RFMO, upaya peningkatan investasi-industrialisasi serta peningkatan kapasitas nelayan lokal pada komoditas TCT terus diakselerasi

Penyederhanaan regulasi	Dalam rangka mewujudkan usaha penangkapan ikan yang berkeadilan serta iklim investasi yang baik, sejumlah peraturan disederhanakan dan beralih pada hukum positif. Beberapa substansi penyederhanaan utama meliputi kemudahan perizinan, pengaturan penggunaan alat penangkapan ikan yang sebelumnya dilarang, kemudahan transshipment, batasan ukuran kapal yang lebih berdaya saing di ZEEI-laut lepas serta lebih melindungi nelayan kecil di perairan kepulauan
Pelabuhan Perikanan Unggul	Peningkatan peran pelabuhan perikanan sebagai 1) pusat bisnis kelautan dan perikanan terintegrasi; 2) pusat layanan dan pendataan serta ketetelusuran yang maju, andal, dan akuntabel; serta 3) <i>Eco Fishing Port</i> , yakni dalam menjaga mutu ikan dan standarisasi ramah lingkungan
Kampung Nelayan Maju	Konsep perwujudan lingkungan permukiman nelayan yang maju, bersih, sehat dan nyaman yang mampu meningkatkan kualitas dan produktivitas kehidupan nelayan dan keluarganya. Salah satu strategi pengembangannya adalah melalui integrasi permukiman nelayan dengan pusat-pusat aktivitas ekonomi, seperti pelabuhan perikanan

Kegiatan Prioritas DJPT	Gambaran Umum
	dan kawasan wisata bahari-kuliner
Armada Perikanan yang Kompetitif	Untuk mewujudkan industrialisasi perikanan, diperlukan armada perikanan (kapal perikanan, alat penangkapan ikan, awak kapal perikanan), serta manajemennya yang kompetitif. Konsep yang diusung yakni pemenuhan aspek ketertelusuran (<i>traceability</i>), standar keamanan kapal, penanganan ikan (<i>fish handling</i>), serta standar keselamatan kerja

BAB. IV INDIKATOR KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

A. Indikator Kinerja

Indikator Kinerja Tahun 2020-2024 Pelabuhan Perikanan Nusantara Tanjungpandan mengalami beberapa perubahan yaitu:

- i. Indikator Kinerja Utama yang telah ditetapkan pada 6 Januari 2020 sebagaimana Tabel 1. Matriks Target Indikator Kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Tanjungpandan Tahun 2020-2024.
- ii. Indikator Kinerja Utama yang ditetapkan pada 14 Januari 2021 sebagaimana Tabel 2. Matriks Target Indikator Kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Tanjungpandan Tahun 2020-2024.
- iii. Indikator Kinerja Utama yang ditetapkan pada 19 Januari 2022 sebagaimana Tabel 3. Matriks Target Indikator Kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Tanjungpandan Tahun 2020-2024.
- iv. Indikator Kinerja Utama yang ditetapkan pada 23 Januari 2023 sebagaimana Tabel 4. Matriks Target Indikator Kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Tanjungpandan Tahun 2020-2024.

Tabel 1 Matriks Target Indikator Kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Tanjungpandan Tahun 2020-2024

SASARAN PROGRAM		INDIKATOR KINERJA		TARGET				
				2020	2021	2022	2023	2024
1.	Pendapatan Nelayan Meningkat di Pelabuhan Perikanan Nusantara Tanjungpandan	1	Jumlah Nelayan yang Terfasilitasi Kredit Perikanan Tangkap (Nelayan)	60	60	60	75	75
2.	Ekonomi Sektor Perikanan Tangkap Meningkat di PPN Tanjungpandan	2	Nilai PNBP di PPN Tanjungpandan (Rp. Juta)	917.78	963.69	1011.87	1062.46	1115.58
3.	Sumber daya ikan berkelanjutan di PPN Tanjungpandan	3	Jumlah Kapal Perikanan yang Menerapkan Logbook Penangkapan (Unit)	20	40	50	60	65
4.	Produktivitas Perikanan Tangkap meningkat di PPN Tanjungpandan	4	Jumlah produksi perikanan tangkap PPN Tanjungpandan (ton)	437,005	458,855	481,797	505,886	531,180

SASARAN PROGRAM		INDIKATOR KINERJA		TARGET				
				2020	2021	2022	2023	2024
5	Peningkatan fasilitas PPN Tanjungpandan	5	Jumlah Pengembangan Pelabuhan Perikanan Nusantara Tanjungpandan (Lokasi)	1	1	1	1	1
		6	Tingkat operasional Pelabuhan Perikanan Nusantara Tanjungpandan (Persen)	80	80	80	80	80
		7	Jumlah Awak Kapal Perikanan yang tersertifikasi berdasarkan keahlian dan keterampilan di Pelabuhan Perikanan Nusantara Tanjungpandan (Orang)	20	60	65	70	70
		8	Persentase penyampaian informasi perizinan pusat-daerah PPN Tanjungpandan (persen)	100	100	100	100	100
6	Tata kelola Pemerintahan yang baik di lingkungan Pelabuhan Perikanan Nusantara Tanjungpandan	9	Nilai pembangunan Zona Integritas menuju WBK di PPN Tanjungpandan (nilai)	45,10	45,10	45,10	75,07	75,07
		10	Indeks Profesionalitas PPN Tanjungpandan (indeks)	72	72	72	72	72
		11	Nilai PMSAKIP Pelabuhan Perikanan Nusantara Tanjungpandan (nilai)	85	85	85	85	85
		12	Nilai IKPA Pelabuhan Perikanan Nusantara Tanjungpandan (Nilai)	88	88	88	88	88

Tabel 2 Matriks Target Indikator Kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Tanjungpandan Tahun 2021-2024 Revisi - 1

SASARAN PROGRAM		INDIKATOR KINERJA		TARGET				
				2020	2021	2022	2023	2024
1.	Pendapatan Nelayan Meningkat di Pelabuhan Perikanan Nusantara Tanjungpandan	1	Jumlah Nelayan yang Terfasilitasi Pendanaan Usaha Perikanan Tangkap (Orang)	60	60	60	75	75
2.	Ekonomi Sektor Perikanan Tangkap Meningkat di PPN Tanjungpandan	2	Nilai PNBPN di PPN Tanjungpandan (Rp. Juta)	917.78	937,8	1011.87	1062.46	1115.58
3.	Sumber daya ikan berkelanjutan di PPN Tanjungpandan	3	Jumlah Kapal Perikanan yang Menerapkan Logbook Penangkapan (Unit)	20	40	50	60	65
4	Produktivitas Perikanan Tangkap meningkat di PPN Tanjungpandan	4	Jumlah produksi perikanan tangkap PPN Tanjungpandan (ton)	437,005	3402,35	3572,46	3751,08	3938,63
5	Peningkatan fasilitas PPN Tanjungpandan	5	Jumlah Pengembangan Pelabuhan Perikanan Nusantara Tanjungpandan (Lokasi)	1	1	1	1	1
6	Pengelolaan PPN Tanjungpandan yang berdaya saing dan berkelanjutan	6	Tingkat operasional Pelabuhan Perikanan Nusantara Tanjungpandan (Persen)	80	81	81	81	81
7	Pengelolaan awak kapal perikanan yang berdaya saing di PPN Tanjungpandan	7	Jumlah nelayan/awak kapal perikanan yang ditingkatkan pengetahuan/kompetensinya (orang)	20	60	65	70	70

SASARAN PROGRAM		INDIKATOR KINERJA		TARGET				
				2020	2021	2022	2023	2024
8	Pengelolaan perizinan sesuai dengan ketentuan di PPN Tanjungpandan	8	Persentase kapal perikanan yang berizin di Pelabuhan Perikanan Nusantara Tanjungpandan (persen)	100	75	75	75	75
9	Tata Kelola pemerintahan yang baik di lingkungan PPN Tanjungpandan	9	Nilai capaian pembangunan Zona Integritas menuju WBK Pelabuhan Perikanan Nusantara Tanjungpandan (Nilai)	45,10	45,10	45,10	75,07	75,07
		10	IP ASN Pelabuhan Perikanan Nusantara Tanjungpandan (indeks)	72	73	73	73	73
		11	Nilai PMSAKIP Pelabuhan Perikanan Nusantara Tanjungpandan	85	85,15	85,15	85,15	85,15
		12	Tingkat Kepatuhan pengadaan barang/jasa satuan kerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Tanjungpandan (persen)	0	72,5	72,5	72,5	72,5
		13	Tingkat kepatuhan pengelolaan BMN satuan kerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Tanjungpandan (persen)	0	72,5	72,5	72,5	72,5

SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA		TARGET				
			2020	2021	2022	2023	2024
	14	Nilai Kinerja Anggaran Pelabuhan Perikanan Nusantara Tanjungpandan (nilai)	0	86	86	86	86
	15	Nilai IKPA Pelabuhan Perikanan Nusantara Tanjungpandan (nilai)	88	89	89	89	89

Tabel 3 Matriks Target Indikator Kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Tanjungpandan Tahun 2022-2024 Revisi -2

SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA		TARGET				
			2020	2021	2022	2023	2024
1. Nilai PNBP Sektor Perikanan Tangkap Meningkatkan Di Pelabuhan Perikanan Nusantara Tanjungpandan	1	Penerimaan PNBP di Pelabuhan Perikanan Nusantara Tanjungpandan (Rp. Juta)	917,78	963,69	962,23	1010,34	1763,53
2. Ketersediaan Data Produksi Pelabuhan Perikanan Nusantara Tanjungpandan yang Akurat	2	Rata-rata volume produksi perikanan tangkap Pelabuhan Perikanan Nusantara Tanjungpandan (Ton)	0	0	267,21	305,01	320,36
3. Pengelolaan Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan yang Berdaya Saing di Pelabuhan Perikanan Nusantara Tanjungpandan	3	Dokumen kapal perikanan yang diterbitkan (Produk)	0	0	50	50	50
4. Pengelolaan Awal Kapal Perikanan yang Tersertifikasi/ Terlindungi di Pelabuhan Perikanan Nusantara Tanjungpandan	4	Nelayan/awak kapal perikanan yang ditingkatkan pengetahuannya/kompetensinya (Orang)	20	60	30	30	30
	5	Awak kapal perikanan yang difasilitasi penerapan Perjanjian Kerja Laut	0	0	30	30	30

SASARAN PROGRAM		INDIKATOR KINERJA		TARGET				
				2020	2021	2022	2023	2024
			(PKL) dengan pelaku usaha (Orang)					
5	Pemenuhan Prasarana Pemungutan PNBPerikanan Tangkap yang Optimal di Pelabuhan Perikanan Nusantara Tanjungpandan	6	Jumlah penyediaan sarana dan prasarana di Pelabuhan Perikanan Nusantara Tanjungpandan untuk menunjang PNBPerikanan tangkap (Unit)	1	1	1	1	1
6	Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Nusantara Tanjungpandan yang Berdaya Saing	7	Tingkat Operasional Pelabuhan Perikanan Nusantara Tanjungpandan (Persen)	80	81	82	83	83
7	Pengelolaan Kenelayanan yang Maju dan Berdaya Saing di Pelabuhan Perikanan Nusantara Tanjungpandan	8	Nelayan yang difasilitasi akses pendanaan usahanya (Orang)	60	60	24	20	20
8	Tata Kelola Sumber Daya Ikan di WPPNRI Perairan Laut yang Bertanggungjawab di Pelabuhan Perikanan Nusantara Tanjungpandan	9	Laporan data logbook penangkapan ikan yang dikumpulkan dan diverifikasi (Laporan)	40	40	100	100	100
9	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di Lingkungan Pelabuhan Perikanan Nusantara Tanjungpandan	9	Nilai Capaian Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK Pelabuhan Perikanan Nusantara Tanjungpandan (Nilai)	45,10	45,10	45,10	75,07	75,07
		10	Presentase penyelesaian temuan LHP BPK (Persen)	0	0	100	100	100
		11	Nilai PMSAKIP Pelabuhan Perikanan Nusantara Tanjungpandan (Nilai)	85	85,15	85,25	85,5	86

SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA		TARGET				
			2020	2021	2022	2023	2024
	12	Indeks Profesionalitas ASN lingkup Pelabuhan Perikanan Nusantara Tanjungpandan (Indeks)	72	72	79	79	80
	13	Tingkat efektivitas pelaksanaan kegiatan prioritas/strategis di Pelabuhan Perikanan Nusantara Tanjungpandan (Persen)	0	0	75	77,5	80
	14	Tingkat Kepatuhan pengadaan barang/jasa Pelabuhan Perikanan Nusantara Tanjungpandan (persen)	0	0	75	77,5	80
	15	Tingkat kepatuhan pengelolaan BMN Pelabuhan Perikanan Nusantara Tanjungpandan (persen)	0	0	75	77,5	80
	16	Nilai IKPA Pelabuhan Perikanan Nusantara Tanjungpandan (nilai)	85	89	89	89	89
	17	Nilai Kinerja Anggaran Pelabuhan Perikanan Nusantara Tanjungpandan (nilai)	0	86	86	86	86

Tabel 4 Matriks Target Indikator Kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Tanjungpandan Tahun 2022-2024 Revisi – 3

SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA		TARGET				
			2020	2021	2022	2023	2024
1. Nilai PNBPN Sektor Perikanan Tangkap Meningkat di Pelabuhan Perikanan Nusantara Tanjungpandan	1	Penerimaan PNBPN di Pelabuhan Perikanan Nusantara Tanjungpandan (Rp. Juta)	917,78	963,69	962,23	1.679,67	1.763,53
2. Produktivitas Perikanan Tangkap di Pelabuhan Perikanan Nusantara Tanjungpandan	2	Volume produksi perikanan tangkap Pelabuhan Perikanan Nusantara Tanjungpandan (Ton)	437,005	0	0	3.250	3412,5
3. Pengelolaan Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan yang Berdaya Saing di Pelabuhan Perikanan Nusantara Tanjungpandan	3	Dokumen kapal perikanan yang diterbitkan (Produk)	0	0	50	50	50
4. Pengelolaan Awal Kapal Perikanan yang Tersertifikasi/ Terlindungi di Pelabuhan Perikanan Nusantara Tanjungpandan	4	Dokumen Awak Kapal Perikanan yang Diterbitkan	0	0	0	1	1
	5	Nelayan/awak kapal perikanan yang ditingkatkan pengetahuannya/kompetensinya (Orang)	20	60	30	30	30
5. Pengembangan dan Peningkatan Fasilitas Pelabuhan Perikanan Nusantara Tanjungpandan yang Optimal	6	Pelabuhan Perikanan yang Ditingkatkan Fasilitasnya untuk Mendukung Penangkapan Ikan Terukur (Unit)	0	0	0	1	1
6. Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Nusantara Tanjungpandan yang Berdaya Saing	7	Tingkat Operasional Pelabuhan Perikanan Nusantara Tanjungpandan (Nilai)	80	81	82	83	83
7. Pengelolaan Kenelayan yang Maju dan Berdaya Saing di Pelabuhan Perikanan Nusantara Tanjungpandan	8	Nelayan yang difasilitasi akses pendanaan usahanya (Orang)	60	60	24	20	20

SASARAN PROGRAM		INDIKATOR KINERJA		TARGET				
				2020	2021	2022	2023	2024
8	Tata Kelola Sumber Daya Ikan di WPPNRI Perairan Laut yang Bertanggungjawab di Pelabuhan Perikanan Nusantara Tanjungpandan	9	Laporan data logbook penangkapan ikan yang dikumpulkan (Laporan)	20	40	100	100	100
9	Tata Kelola Pemerintah yang Baik di Lingkungan Pelabuhan Perikanan Nusantara Tanjungpandan	9	Nilai Capaian Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK Pelabuhan Perikanan Nusantara Tanjungpandan (Nilai)	45,10	45,10	45,10	45,10	75,07
		10	Presentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Tanjungpandan (Persen)	0	0	0	75	77,5
		11	Nilai Rekonsiliasi Kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Tanjungpandan (Nilai)	0	0	0	93	93
		12	IP ASN lingkup Pelabuhan Perikanan Nusantara Tanjungpandan (Indeks)	72	72	79	79	80
		14	Tingkat Kepatuhan pengadaan barang/jasa Pelabuhan Perikanan Nusantara Tanjungpandan (persen)	0	72,5	75	77,5	80
		15	Tingkat kepatuhan pengelolaan BMN Pelabuhan Perikanan Nusantara	0	72,5	75	77,5	80

SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA		TARGET				
			2020	2021	2022	2023	2024
		Tanjungpandan (persen)					
	16	Nilai Kinerja Anggaran Pelabuhan Perikanan Nusantara Tanjungpandan (nilai)	0	86	81	82	82
	17	Nilai IKPA Pelabuhan Perikanan Nusantara Tanjungpandan (nilai)	85	89	89	89	89

Tabel 5 Matriks Target Indikator Kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Tanjungpandan Tahun 2022-2024 Revisi-4

SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA		TARGET				
			2020	2021	2022	2023	2024
1. Nilai PNB Sektor Perikanan Tangkap Meningkat di Pelabuhan Perikanan Nusantara Tanjungpandan	1	Penerimaan PNB Non SDA di Pelabuhan Perikanan Nusantara Tanjungpandan (Rp. Juta)	917,78	963,69	962,23	1.679,67	1.835,60
2. Produktivitas Perikanan Tangkap di Pelabuhan Perikanan Nusantara Tanjungpandan	2	Volume produksi perikanan tangkap di Pelabuhan Perikanan Nusantara Tanjungpandan (Ton)	437,005	0	0	3.250	3.496
3. Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Nusantara Tanjungpandan yang Berdaya Saing	3	Persentase permohonan perusahaan yang dianalisa dan/atau dievaluasi di Pelabuhan Perikanan Nusantara Tanjungpandan (Persen)	0	0	0	100	100
	4	Tingkat kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Tanjungpandan (Nilai)	80	81	82	83	84

SASARAN PROGRAM		INDIKATOR KINERJA		TARGET				
				2020	2021	2022	2023	2024
		5	Tingkat pelayanan Kesyahbandaran Pelabuhan Perikanan Nusantara Tanjungpandan (Persen)	0	0	0	27	27,21
4	Pengembangan dan Peningkatan Fasilitas Pelabuhan Perikanan Nusantara Tanjungpandan yang Optimal	6	Persentase pengendalian pengembangan fasilitas Pelabuhan Perikanan Nusantara Tanjungpandan (Persen)	0	0	0	30	80
		7	Nilai pengendalian lingkungan di Pelabuhan Perikanan Nusantara Tanjungpandan (Nilai)	0	0	0	30,01	30,10
5	Pengelolaan Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan yang Berdaya Saing di Pelabuhan Perikanan Nusantara Tanjungpandan	8	Kapal perikanan izin daerah yang memenuhi ketentuan (Kapal)	0	0	50	50	40
6	Pengelolaan Awak Kapal Perikanan yang Tersertifikasi/ Terlindungi di Pelabuhan Perikanan Nusantara Tanjungpandan	9	Persentase peningkatan pengetahuan kompetensi dan perlindungan nelayan/awak kapal perikanan (Persen)	0	0	0	23	24
7	Tata Kelola Pemerintah yang Baik di Lingkungan Pelabuhan Perikanan Nusantara Tanjungpandan	10	Nilai PM Pembangunan ZI Pelabuhan Perikanan Nusantara Tanjungpandan (Nilai)	45,10	45,10	45,10	45,10	80
		10	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Tanjungpandan (Persen)	0	0	0	75	80

SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA		TARGET				
			2020	2021	2022	2023	2024
	11	Nilai Rekonsiliasi Kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Tanjungpandan (Nilai)	0	0	0	93	94
	12	Indeks Profesionalitas ASN lingkup Pelabuhan Perikanan Nusantara Tanjungpandan (Indeks)	72	72	79	79	84
	14	Tingkat Kepatuhan pengadaan barang/jasa Pelabuhan Perikanan Nusantara Tanjungpandan (persen)	0	72,5	75	77,5	80
	15	Tingkat kepatuhan pengelolaan BMN Pelabuhan Perikanan Nusantara Tanjungpandan (persen)	0	72,5	75	77,5	80
	16	Nilai IKPA Pelabuhan Perikanan Nusantara Tanjungpandan (nilai)	85	89	89	89	93,76
	17	Nilai kinerja anggaran Pelabuhan Perikanan Nusantara Tanjungpandan (nilai)	0	86	81	82	86
	18	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat lingkup Pelabuhan Perikanan Nusantara Tanjungpandan (Indeks)	0	0	0	88,21	88,30

B. Kerangka Pendanaan

Untuk melaksanakan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dari Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap dibutuhkan dukungan pendanaan yang memadai dan proporsional yang diarahkan untuk mencapai target dengan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan. Kerangka pendanaan yang dibutuhkan dalam program pengelolaan perikanan tangkap merupakan kerangka pendanaan untuk melaksanakan kegiatan sebagai berikut:

1. Kegiatan pengelolaan kapal perikanan dan alat penangkapan ikan dan pengawakan kapal perikanan;
2. Kegiatan pengelolaan Pelabuhan perikanan;
3. Kegiatan pengelolaan perizinan dan kenelayanan;
4. Kegiatan pengelolaan sumber daya ikan;
5. Dukungan manajemen internal lingkup ditjen perikanan tangkap.

Secara garis besar, kerangka pendanaan yang dibutuhkan adalah untuk membiayai kegiatan operasional Pelabuhan Perikanan Nusantara Tanjungpandan dan kegiatan pengembangan dalam bentuk pengembangan fasilitas, sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk mendukung operasional Pelabuhan Perikanan Nusantara Tanjungpandan secara umum. Kerangka pendanaan operasional dan pengembangan bersumber dari Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara (APBN) baik dari rupiah murni maupun dari dana yang bersal dari pengembalian Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Adapun kebutuhan pendanaan yang direncanakan sebagaimana terlampir.

BAB V. PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Pelabuhan Perikanan Nusantara Tanjungpandan Revisi 3 Tahun 2020 – 2024 merupakan acuan utama dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) dan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Pelabuhan Perikanan Nusantara Tanjungpandan, sehingga penyusunan lebih terarah dan terencana dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan serta lebih efisien dalam pelaksanaannya, baik dipandang dari aspek pengelolaan sumber pembiayaan maupun dalam percepatan waktu realisasinya.

Renstra Pelabuhan Perikanan Nusantara Tanjungpandan Revisi 4 Tahun 2020 - 2024 disusun dengan mempertimbangkan potensi, peluang, serta kendala, dan permasalahan yang dihadapi sehingga penetapan target-target yang berorientasi pada hasil dan diharapkan dapat dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun. Kegiatan-kegiatan dengan output yang mendukung prioritas nasional menjadi prioritas utama, selain kegiatan-kegiatan yang secara langsung menjadi tanggung jawab dan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Pelabuhan Perikanan Nusantara Tanjungpandan. Namun demikian, Renstra ini dimungkinkan untuk dilakukan penyesuaian-penyesuaian sejalan dengan dinamika perkembangan internal dan eksternal organisasi.

Disadari bahwa keberhasilan pelaksanaan program-program Pelabuhan Perikanan Nusantara Tanjungpandan juga dihasilkan berkat adanya dukungan seluruh komponen di Pelabuhan Perikanan Nusantara Tanjungpandan serta berbagai sektor terkait lainnya, masyarakat juga termasuk seluruh stakeholders Pelabuhan Perikanan Nusantara Tanjungpandan. Kerja keras dari seluruh jajaran Pelabuhan Perikanan Nusantara Tanjungpandan dan sinergitas dengan semua pihak yang terkait sangat diperlukandalam rangka mewujudkan tujuan serta sasaran program dan Pelabuhan Perikanan Nusantara Tanjungpandan yang tertuang dalam Rencana Strategis ini.